

**IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DALAM
PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
DI SMK PGRI 2 CIMAHI**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
Memperoleh Gelar Sarjana
pada jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Oleh :
Yusril Putra Nugraha
NPM 21500035



**SSEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (STKIP)
PASUNDAN
CIMAHI
2025**

HALAMAN PENGESAHAN

Disetujui oleh

Pembimbing I

Dr. Neneng Triuspita.S.H.,M.Pd.
NIPY. 1814029

Pembimbing II

Dr. Aprilio Popy Belladonna, S.H.,M.Pd.
NIPY. 1814067

Diketahui dan disahkan oleh

Ketua STKIP Pasundan

**Ketua Jurusan Pendidikan IPS
Progeram Studi PPKn**

Prof. Dr. Dedi Supriadi, M.Pd., AIFO
NIP.196012251988031002

Dr. Yusuf Faisal Ali, S.Pd., M.H
NIPY. 1814140

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Yusril Putra Nugraha

NPM : 21500035

menyatakan bahwa skripsi yang berjudul *Implementasi Pendidikan anti korupsi dalam pembelajaran Pendidikan kewarganegaraan di SMK PGRI 2 Cimahi* ini beserta seluruh isinya benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dalam Masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung risiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya saya ini, atau ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya saya ini.

Cimahi, 20 Juni 2025

Yang membuat pernyataan,

Yusril Putra Nugraha

KATA PENGANTAR

Puji Syukur panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan karunia-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul Implementasi Pendidikan anti korupsi dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di SMK PGRI 2 Cimahi ini dengan sebaik-baiknya.

Dalam pembuatan skripsi ini tentunya tidak lepas dari peran dari pihak-pihak yang membantu. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Dedi Supriadi, M.Pd., AIFO selalu ketua STKIP Pasundan
2. Dr. Yusuf Faisal Ali, S.Pd., M.H selaku Ketua Jurusan Pendidikan IPS Progeram Studi PPKn
3. Dr. Neneng Triuspita.S.H.,M.Pd. selalu dosen pembimbing I.
4. Dr. Aprilio Popy Belladonna, S.H.,M.Pd. Selaku dosen pembimbing II.
5. Indra Lesmana, S.Si., M.Pd. selaku Wakil Kepala Sekolah SMK PGRI 2 Cimahi

Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik serta saran dari semua pihak yang bersifat membangun dibutuhkan untuk menyempurnakan skripsi ini. Akhir kata penulis ucapkan terimakasih. Semoga proposal ini dapat bermanfaat khususnya bagi kami bagi semua pembaca.

Cimahi, 20 Juni 2025

Penulis

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim...

Puji Syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat serta hidayah-nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan penuh kerendahan hati dan kesabaran yang luar biasa.

Keberhasilan dalam penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari berbagai bantuan pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan terimakasih kepada :

1. Kepada bidadari surgaku, Ibu Uun Sumiati. Beliau tidak sempat menyelesaikan bangku perkuliahan karena keterbatasan ekonomi namun beliau mendidik, mendoakan tiada henti kepada penulis dan selalu berusaha bekerja keras demi penulis bisa sampai di titik ini. Terimakasih sebesar-besarnya atas setiap tetes keringat dalam setiap pengorbanan, kerja keras, dukungan, nasihat yang engkau berikan yang selalu mendoakan dan memberi semangat, kasih sayang dan doa yang tiada hentinya serta pengorbanan yang luar biasa demi keberhasilan putra tercintamu di masa depan. Semoga ibu selalu dalam keadaan sehat, Panjang umur dan Bahagia selalu.
2. Prof. Dr. Dedi Supriadi, M.Pd., AIFO. Selaku ketua STKIP Pasundan Cimahi yang telah memberikan sarana dan prasarana perkuliahan yang memungkinkan peneliti dapat menyelesaikan studi.
3. Dr. Akhmad Olih Solihin, M.Pd. selaku Wakil Ketua I Bidang Akademik (DIKJAR), Kemahasiswaan, Alumni, Budaya dan Agama yang telah memberikan kelancaran dan ilmu pengetahuan selama peneliti menjadi mahasiswa.
4. Dra. Iis Suryani Herdiah, M.Pd. selaku Wakil Ketua II Bidang Perencanaan, SDM, Administrasi Umum, Keuangan, Aset, dan Sistem Teknologi yang telah memberikan kelancaran dan ilmu pengetahuan selama peneliti menjadi mahasiswa.
5. Dr. Vicky Ahmad Karisman, M.Pd. selaku Wakil Ketua III Bidang Riset, Pengabdian Masyarakat, Kerja sama, Inovasi, Humas, Promosi, dan Dana

Usaha yang telah memberikan kelancaran dan ilmu pengetahuan selama peneliti menjadi mahasiswa.

6. Dr. Yusuf Faisal Ali, S.Pd., M.H. selaku Ketua Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang senantiasa memberikan nasehat dan bimbingan selama peneliti menempuh proses pendidikan di STKIP Pasundan Cimahi hingga terselesaikannya penelitian ini.
7. Dr. Andrian, M.Pd. selaku Sekretaris Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan terima kasih atas segala ilmu, bantuan, arahan dan motivasi selama peneliti menempuh ilmu di STKIP Pasundan Cimahi hingga terselesaikannya penelitian ini.
8. Dr. Neneng Triuspita, S.H., M.Pd. selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan segala ilmu, masukan, arahan, nasehat dan semangat kepada peneliti dalam penyusunan penelitian ini. Terima kasih atas segala ilmu yang telah diberikan.
9. Dr. Aprillio Poppy Belladonna, S.H., M.Pd. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan segala ilmu, arahan, masukan, nasehat dan semangat kepada peneliti dalam penyusunan penelitian ini. Terima kasih atas segala ilmu yang telah diberikan.
10. Rina Marlina, M.Pd. selaku Dosen Wali yang telah memberikan kasih sayang dan arahnya selama menjadi wali peneliti. Terima kasih atas semua bantuan, masukan, dan motivasi kepada peneliti selama menempuh pendidikan di STKIP Pasundan.
11. Seluruh Dosen dan Staff STKIP Pasundan Cimahi, yang telah memberikan bimbingan dan ilmu pengetahuan kepada peneliti selama menjadi mahasiswa.
12. Drs. Riza Munandar, selaku Kepala Sekolah SMK PGRI 2 Cimahi yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk melaksanakan penelitian.
13. Ahmad Saefudin, S.Pd. selaku Pembina OSIS SMK PGRI 2 Cimahi yang telah membantu dalam penelitian ini.

14. Seluruh informan siswa/i Pengurus OSIS dan non-pengurus OSIS yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk melakukan wawancara
15. Rekan seperjuangan *Civic Education* 2021 yang telah sama-sama berjuang dari awal perkuliahan sampai akhir.
16. Sahabat-sahabat pergerakan yang terus mengawal dan memberi support saya dalam penyusunan skripsi saya ini
17. Seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi, namun namanya tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu.
18. Mom Rina Cell & Paps Miswan swan Yang selalu memberikan nasehat dan masukan terhadap segala keluh kesah yang peneliti utarakan, terima kasih atas kebaikan yang telah diberikan sehingga peneliti merasa seperti mempunyai sosok ibu.dan ayah di luar rumah
19. Kepada Wanita hebat, Sabila Siti Salamah yang telah menemani saya dalam mengerjakan skripsi serta memberikan semangat sampai terselesaikannya skripsi ini. Terimakasih atas dukungan, kebaikan, perhatian, kebijaksanaan dan keluasan hatinya, terimakasih atas motivasi dan semangat yang telah diberikan selama proses penyelesaian skripsi ini. Kamu telah menjadi sumber kekuatan bagi saya dan membantu saya menghadapi setiap tantangan dalam menjalani kehidupan.
20. Terakhir untuk diri sendiri, Yusril Putra Nugraha. Terimakasih sudah menepikan ego dan memilih untuk kembali bangkit dan menyelesaikan semua ini. Terimakasih telah mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah mau memutuskan untuk menyerah. Kamu hebat Cil.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi pendidikan antikorupsi dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) di SMK PGRI 2 Cimahi. Fokus penelitian ini meliputi pemahaman siswa terhadap nilai-nilai antikorupsi, program pendukung yang diterapkan oleh sekolah, serta dampak yang ditimbulkan dari penanaman nilai-nilai tersebut. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada pentingnya pendidikan karakter sejak dini sebagai upaya preventif dalam memerangi budaya korupsi yang telah mengakar dalam masyarakat Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini terdiri dari guru PPKn, guru BK, siswa, serta kepala sekolah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman siswa terhadap nilai-nilai antikorupsi cukup baik. Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan integritas telah mulai terinternalisasi melalui metode pembelajaran aktif dan kontekstual. Meskipun tidak terdapat program khusus bertajuk "pendidikan antikorupsi", sekolah berhasil mengintegrasikan nilai-nilai tersebut dalam kegiatan pembelajaran dan budaya sekolah. Guru berperan penting sebagai teladan dan fasilitator dalam proses ini. Dampak positif terlihat dari perubahan perilaku siswa yang lebih jujur, bertanggung jawab, dan kritis terhadap tindakan korupsi. Pendidikan antikorupsi di SMK PGRI 2 Cimahi telah berkontribusi pada pembentukan karakter siswa yang siap menjadi agen perubahan di masyarakat.

Kata kunci: Pendidikan Antikorupsi, PPKn, Nilai Karakter, Integritas, SMK PGRI 2 Cimahi.

ABSTRACT

This study aims to describe the implementation of anti-corruption education in the Civic Education (PPKn) learning process at SMK PGRI 2 Cimahi. The focus of this research includes students' understanding of anti-corruption values, the supporting programs implemented by the school, and the impact of instilling these values. The background of the study is based on the importance of early character education as a preventive effort to combat the culture of corruption that has become deeply rooted in Indonesian society. This research employs a qualitative descriptive method with data collected through observation, interviews, and documentation. Informants consist of Civic Education teachers, guidance and counseling teachers, students, and the school principal. The results show that students have a good understanding of anti-corruption values. Values such as honesty, responsibility, and integrity have begun to be internalized through active and contextual learning methods. Although there is no formal program specifically labeled "anti-corruption education," the school has successfully integrated these values into both learning activities and the overall school culture. Teachers play a crucial role as role models and facilitators in this process. Positive impacts are evident in students' behavior, which reflects greater honesty, responsibility, and critical attitudes toward corrupt practices. Anti-corruption education at SMK PGRI 2 Cimahi has contributed to shaping students' character and preparing them to become agents of change in society.

Keywords: *Anti-Corruption Education, Civic Education, Character Values, Integrity, SMK PGRI 2 Cimahi.*

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	
KATA PENGANTAR	i
UCAPAN TERIMA KASIH	ii
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang	1
B. Pembatasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	9
1. Penelitian Teoritis	9
2. Kegunaan Praktis	9
F. Struktur Organisasi Skripsi	9
BAB II KAJIAN TEORI, KERANGKA BERPIKIR	11
A. Kajian Pendidikan Antikorupsi	11
1. Pengertian Pendidikan	11
2. Pengertian korupsi	14
B. Pengertian Antikorupsi	16
C. Pengertian Pendidikan Anti Korupsi	17
D. Pendidikan anti korupsi dalam sistem pendidikan nasional	20
E. Perilaku Anti Korupsi	24
F. Upaya Pencegahan Tindakan Korupsi	28
G. Pendidikan kewarganegaraan sebagai Nilai-nilai Pendidikan antikorupsi	30
H. kerangka berpikir	32

I. Penelitian terdahulu.....	34
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Metode Penelitian	38
B. Teknik Pengumpulan Data.....	39
C. Teknik Penentuan Informan.....	40
D. Tempat dan Waktu Penelitian	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
A. Deskripsi Tempat Penelitian	44
B. Deskripsi Hasil Penelitian	47
C. Pembahasan Hasil Penelitian	56
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	70
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA.....	73
LAMPIRAN.....	78
RIWAYAT HIDUP	96

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kerangka Berpikir.....	32
----------------------------------	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Denah SMK PGRI 2 Cimahi.....	45
Gambar 4.2 SMK PGRI 2 Cimahi.....	46

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Permohonan Izin Penelitian

Lampiran 2 Surat Balasan Permohonan Izin Penelitian

Lampiran 3 Pedoman Wawancara

Lampiran 4 Pedoman Observasi

Lampiran 5 Surat Permohonan Menjadi Informan

Lampiran 6 Dokumentasi

Lampiran 7 Surat Keputusan pengangkatan dosen pembimbing penulisan skripsi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Indonesia saat ini sedang dalam kondisi darurat korupsi, Korupsi dan pungli merupakan tindakan ilegal yang termasuk dalam kategori KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). Meskipun demikian, praktik ini masih sering terjadi di Indonesia, terutama oleh pejabat atau aparat pemerintahan yang menyalahgunakan wewenangnya (Hendra, 2019). hal tersebut terjadi karena ketiga perilaku tersebut melakukan pelanggaran terhadap prinsip kejujuran, pelanggaran terhadap hukum yang berlaku di suatu negara, mengurangi wibawa negara dan pemerintah,serta mengakibatkan biaya ekonomi tinggi karena menaikkan harga produk dan menurunkan daya saing bisnis suatu negara.penyebab korupsi meliputi dua faktor utama yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berkaitan dengan diri seseorang, ini berhubungan erat dengan kualitas kehidupan moral, keimanan, dan kejujuran. Faktor eksternal mencakup aspek kehidupan keluarga, lingkungan politik, lingkungan organisasi, dan lingkungan kerja (Wilhelmus, 2017). Korupsi yang ada tidak hanya dari persoalan besar namun korupsi ada dari persoalan yang sepele yang jika dibiarkan juga akan menjadi persoalan besar.

Korupsi tidak hanya menjadi masalah serius di tubuh pemerintahan, tetapi juga merupakan fenomena global yang mempengaruhi masyarakat secara keseluruhan dan menghancurkan semua aspek kehidupan (Ni Ketut, 2023). Akibat dari adanya korupsi tidak hanya kepada kerugian materi tetapi juga dapat membahayakan stabilitas sosial dan keamanan masyarakat, menghambat pembangunan, serta merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas bangsa (Evi, 2008). Dalam upaya membrantas korupsi ada dua bagian besar yaitu penindakan dan pencegahan, jika upaya tersebut hanya dilakukan oleh pemerintah maka tidak akan pernah bisa efektif, maka perlu adanya peran dari segala aspek terutama aspek pendidikan di sekolah.

Hal diatas sejalan dengan yang diungkapkan oleh Ni Ketut (2023) bahwa Pendidikan antikorupsi dapat diterapkan secara strategis oleh sekolah atau perguruan tinggi, khususnya dalam menumbuhkan perilaku antikorupsi di kalangan siswa. Upaya pendidikan antikorupsi tentu akan menjadi solusi yang efektif dalam meminimalkan tindak pidana korupsi. Salah satu upaya yang dilakukan untuk menanamkan polar pikir, sikap dan perilaku antikorupsi melalui sekolah, karena sekolah adalah proses pembudayaan (Hassan, 2004). Bentuk upaya penanggulangan korupsi tentu menjadi kajian yang sangat menarik di dunia saat ini. Maka dari itu perlu adanya strategi dan upaya maksimal oleh pemerintah untuk meminimalkan hal itu. Pemerintah memandang Lembaga yang efektif dalam memperkenalkan bentuk dan budaya korupsi pada peserta didik sejak dini yakni melalui Pendidikan antikorupsi. (Sri Rezki, 2020)

Komisi Pemberantasan Korupsi berupaya melakukan pemberantasan korupsi. Pendidikan antikorupsi baru muncul dan dihadirkan di tingkat SD, SMP, dan SMA guna menyelesaikan permasalahan kasus korupsi yang marak di Indonesia dengan cara membiasakan atau mengarahkan tindakan antikorupsi melalui pendidikan. Pendidikan anti korupsi merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam menanamkan sikap dan nilai anti korupsi. Melalui Pendidikan anti korupsi, diharapkan individu yang merupakan bagian dari masyarakat berupaya mendorong generasi masa depan untuk mengembangkan sikap menolak secara tegas asetiap bentuk korupsi. (Achmad, Afrian, & Elly, 2018). Nilai-nilai antikorupsi yang diterapkan melalui pendidikan antikorupsi terdiri dari 9 nilai : Jujur, Tanggung jawab, Disiplin, Mandiri, Kerja keras, Sederhana, Berani, Peduli, adil terhadap peserta didik agar sejak dini memahami bahwa korupsi itu bertentangan. dengan norma-norma yang ada di Indonesia. (Aksi, 2022)

Hal diatas menunjukan nilai-nilai anti korupsi yang perlu diterapkan sejak dini dengan meningkatkan intensif hati, perasaan, dan kecerdasan emosional, pendidikan lebih menitik beratkan pada kecerdasan intelektual, penalaran, dan keterampilan bernalar (Komisi P. K., 2025). Dalam konteks ini, dianggap bahwa

pendidikan kita telah menjadikan orang-orang oportunistik, munafik, hedonis, sombong, dan tidak memiliki kecerdasan, emosi, atau hati nurani. Tak heran jika orang-orang bergelar formal berpendidikan tinggi kerap terlibat dalam kasus-kasus yang merugikan negara, seperti korupsi. Hal ini menunjukkan bahwa, model pendidikan kita sampai saat ini setidaknya telah memberikan kontribusi terhadap maraknya korupsi, nepotisme, dan kolusi yang telah menempatkan bangsa kita di antara bangsa-bangsa dengan tingkat korupsi tertinggi di dunia. (Ni Ketut, 2023)

Pendidikan merupakan upaya sadar dan terencana untuk mewujudkan lingkungan belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif bisa mengembangkan potensi diri untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat adalah yang dimaksud dengan didefinisikan sebagai pendidikan dalam arti luas (Abd, Sabhayati, Andi, Yuyun, & Yumriani, 2022). Agar manusia menjadi pribadi yang sempurna jasmani dan rohani, maka pendidikan adalah suatu proses pembelajaran yang dapat menyempurnakan lahir dan batin. Maka program pendidikan dianggap gagal apabila menghasilkan individu yang lemah, korup, tidak bertanggung jawab, tidak bermoral, dan tidak mampu berperilaku mandiri. Kegagalan ini mungkin disebabkan oleh kesalahan manajemen pendidikan atau filosofi yang bertentangan dengan apa yang dimaksud dengan pendidikan (Iman, Soca, Dzikril, & Kalfin, 2024). Akhir-akhir ini kita mengamati bahwa kritik masyarakat seringkali terfokus pada berbagai isu pendidikan nasional. Pendidikan di Indonesia dianggap tidak melahirkan orang-orang yang berpendidikan, beretika, dan berperikemanusiaan. Karena kita mencermati masih ada berbagai bentuk kekerasan, anarki, korupsi, perusakan, dan tindakan asusila saat ini sedang mengguncangkan sendi-sendi bangsa. (Ni Ketut, 2023)

Makna pendidikan yang sebenarnya adalah situasi yang memungkinkan peserta didik mengembangkan jati dirinya secara menyenangkan, terbuka, dan tidak terbatas tanpa terjerat dalam lingkungan yang monoton, kaku, atau tegang. Suka atau tidak suka, pendidikan kita belum menghasilkan generasi yang

memiliki jati diri yang utuh. Pendidikan di Indonesia memang menghasilkan orang-orang yang pintar namun tidak sedikit mereka kehilangan sikap yang jujur dan rendah hati. Kualitas pendidikan sangat mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Karena itu, pendidikan memainkan peran penting dalam membentuk masa depan bangsa. Pendidikan berkontribusi pada pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, yang meliputi indikator ahli, kreatif, inovatif, ahli berkualitas, dan sikap positif. Dalam Pasal 31 Ayat 1 Undang-undang dasar 1945 disebutkan bahwa dalam amanat pembukaan terdapat visi pendidikan di Indonesia mengacu pada landasan filosofis yang sangat dalam yang searah dengan HAM untuk belajar (Trisna, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa sistem pendidikan secara hukum didasarkan pada filosofi pendidikan yang mengakui karakteristik pribadi yang unik dari setiap orang. Hal ini memperlihatkan bahwa perkembangan anak di Indonesia secara implisit memasukkan kemungkinan untuk mewujudkan prinsip eksplorasi dan kecenderungan kreatif. Penjelasan diatas telah diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Undang-Undang, Tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2003). Namun pada kenyataannya, pendidikan yang selama ini dilakukan belum efektif dalam memberikan nilai-nilai antikorupsi pada peserta didik. Belum lagi tidak bisa dipungkiri sistem hukum di negara Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, seperti lemahnya penegakan hukum, ketidaktegasan sanksi, dan masih adanya praktik korupsi di Lembaga-lembaga penegak hukum itu sendiri, sehingga upaya pemberantasan korupsi belum berjalan optimal.

Berkaitan dengan penegakan hukum korupsi, kita dapat meninjau hal ini dari 3 komponen, yaitu struktur, substansi, dan kultur (budaya). Komponen struktur adalah bagian-bagian yang bergerak dalam suatu mekanisme, komponen substansi merupakan hasil aktual yang di hasilkan oleh sistem hukum dan meliputi kaedah-kaedah hukum yang tidak tertulis. Sedangkan komponen kultur adalah nilai-nilai dan sikap-sikap yang mengikat sistem hukum itu secara bersama dan menghasilkan suatu bentuk penyelenggaraan hukum dalam budaya masyarakat secara keseluruhan. (Friedman, 1975) nilai-

Nilai dan sikap-sikap ini dianggap semacam bensin yang akan menggerakkan motor tatanan hukum yang ada, bahwa tanpa motor penggerak ini maka pranata hukum itu akan menjadi lembaga yang mati belaka. (Sajipto, 1983) mengemukakan 3 (tiga) arti mengenai kebijakan kriminal, yaitu :

- a. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dan reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
- b. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk didalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi
- c. Dalam arti paling luas, ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sosial dalam masyarakat. (Sudarto, 1983)

Pengetahuan tidak dapat dipungkiri menjadi upaya yang tepat dalam menerapkan nilai-nilai antikorupsi tersebut dalam diri peserta didik. Pendidikan hendaknya menjadi prioritas agar masyarakat dapat mengembangkan kemampuannya untuk mandiri, berkarakter, berpengetahuan, mempunyai kemampuan dan kemampuan yang lebih tinggi yang dibutuhkannya, serta masyarakat, bangsa, dan pemerintah. Pendidikan diperlukan untuk menunjang kehidupan seseorang, bahkan kehidupan masyarakat (Nurul, et al., 2024). Dengan pendidikan, masyarakat dapat memahami hakikat kehidupannya dan dapat berinteraksi sosial karena memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperolehnya. melalui kursus berdasarkan cara pemecahan masalah melalui pengetahuan.

Pada dasarnya pendidikan antikorupsi dapat diartikan sebagai suatu program pendidikan yang bertujuan untuk menjelaskan dan mengatasi berbagai bentuk korupsi yang terjadi dengan memperkenalkan nilai-nilai antikorupsi sejak kecil dan bertujuan untuk menciptakan dan meningkatkan kesadaran warga negara terhadap korupsi risiko dan hasil, imbalan. korupsi (Fattah, 2008). Pelatihan antikorupsi memiliki tiga tujuan. Pertama, menciptakan pengetahuan dan pemahaman tentang hakikat korupsi dan ciri-cirinya. Kedua, sikap dan

sikap terhadap korupsi telah berubah. Ketiga, membangun keterampilan dan kemampuan baru yang bertujuan memerangi korupsi (Ksuma, 2008).

Pendidikan antikorupsi yang diterapkan tidak hanya di perguruan tinggi saat ini, namun juga sudah diterapkan di tingkat SD, SMP, dan SMA yang memberikan pemahaman tentang antikorupsi dan menanamkan nilai-nilai antikorupsi agar tidak terjerumus dalam kebiasaan korupsi. Adanya pendidikan antikorupsi pada tingkat SD, SMP, dan SMA sangat diperlukan selain untuk menanamkan nilai-nilai antikorupsi juga dapat menanamkan nilai dan moral pada diri siswa agar tidak melakukan kebiasaan-kebiasaan yang mengarah pada korupsi. Bertindak sejak dini seperti menanamkan rasa jujur, rasa tanggung jawab, rasa adil, rasa peduli, rasa disiplin, rasa mandiri, rasa berani, rasa mandiri dan rasa percaya diri. Kerja keras melalui bidang pendidikan dalam proses pembelajarannya, sehingga dengan adanya pendidikan antikorupsi di sekolah dapat melahirkan generasi muda yang jujur dan berintegritas sejak dini. (Dayu, Muhammad, & Nur, 2021).

Ada beberapa hal yang dikembangkan dalam proses pendidikan antikorupsi di sekolah, yaitu pengetahuan tentang korupsi, pengembangan sikap anti korupsi, perubahan sikap anti korupsi, pendidikan moral, dan pengembangan karakter anti korupsi. Hal ini sangat penting untuk dikembangkan guna membangun kesadaran siswa untuk tidak melakukan kebiasaan-kebiasaan yang mengarah pada korupsi melalui pendidikan antikorupsi di sekolah. Permasalahan yang ditemui di sekolah yang mengarah pada kebiasaan koruptif, misalnya siswa tidak membayar sesuai dengan yang dibelinya di kantin sekolah, siswa menyontek atau melihat jawaban temannya saat mengerjakan tugas atau ulangan atau latihan soal yang diberikan guru, sering kali datang terlambat ke sekolah, siswa tidak mempunyai rasa tanggung jawab dalam mengerjakan tugas yang diberikan guru dan tidak menyerahkan tugas tepat waktu. Hal ini disebabkan rendahnya kesadaran peserta didik dalam menerapkan sikap tanggung jawab, disiplin dan jujur serta kurangnya pemahaman terhadap nilai-nilai antikorupsi dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang dilakukan peneliti di SMK PGRI 2 CIMAH I diketahui

bahwa masih kurangnya kesadaran siswa untuk menerapkan sikap disiplin dan tanggung jawab, seperti tidak datang tepat waktu ke sekolah dan juga tidak hadir tepat waktu dalam menyerahkan tugas. Selanjutnya rendahnya rasa kejujuran siswa seperti berbuat curang pada saat mengerjakan pekerjaan rumah, latihan sekolah atau ulangan harian atau ulangan akhir semester.

Fakta-fakta di atas menunjukkan bahwa peserta didik belum memiliki Pemahaman yang baik perihal. Hal ini memperkuat pernyataan siswa bahwa siswa sebelumnya tidak mengetahui tentang tindakan antikorupsi karena guru tidak memahami dan menjelaskan kurikulum antikorupsi sehingga siswa tidak menerapkan tindakan pencegahan secara tegas. pendidikan yang korup. nilai peluruhan. Selain itu Hal ini terjadi karena belum adanya pemahaman awal mengenai nilai-nilai antikorupsi di kalangan pelajar. Melalui pendidikan antikorupsi dalam proses pembelajaran di sekolah yaitu membiasakan atau mengarahkan tindakan antikorupsi seperti membiasakan kejujuran, keadilan, tanggung jawab, disiplin dan kepedulian. Pendidikan antikorupsi telah dilaksanakan di tingkat SMK, salah satunya SMK PGRI 2 CIMAHI. Namun saat ini materi pendidikan antikorupsi tidak berdiri sendiri sebagai mata pelajaran wajib, melainkan pendidikan antikorupsi masih dipadukan dengan materi pelajaran lainnya, khususnya pada mata pelajaran PPKn dan pendidikan agama. Sejalan dengan hal tersebut, pendidikan anti korupsi dilaksanakan di sekolah untuk menanamkan nilai-nilai antikorupsi serta menanamkan nilai dan moral pada siswa untuk membangun kesadaran siswa agar tidak melakukan kebiasaan-kebiasaan yang mengarah pada korupsi sejak dini. Membangun kesadaran siswa agar tidak melakukan kebiasaan yang mengarah pada korupsi sangat membutuhkan peran seorang guru. Dimana guru merupakan seorang motivator yang mempunyai peranan yang sangat penting bagi keberhasilan siswa karena keberhasilan siswa dalam proses pembelajaran dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu guru, siswa dan lingkungan. Salah satunya adalah guru PPKn yang mempunyai peranan penting dalam membentuk nilai dan moral peserta didik agar menjadi generasi penerus bangsa yang berkualitas.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DALAM PEMBELAJARAN PKN DI SMK PGRI 2 CIMAHU”. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui dan memahami peran guru PPKn dalam menanamkan nilai-nilai antikorupsi dan membentuk moral siswa dalam melaksanakan pendidikan antikorupsi di sekolah agar siswa terbiasa dengan tindakan yang mengarah pada antikorupsi.

B. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan definisi masalah yang telah dijelaskan, maka batasan masalah dalam penelitian ini adalah “Implementasi Pendidikan Anti korupsi dalam pembelajaran Pendidikan kewarganegaraan di SMK PGRI 2 CIMAHU”.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemahaman siswa mengenai nilai-nilai anti korupsi di SMK PGRI 2 Cimahi ?
2. Bagaimana program pendukung penanaman karakter anti korupsi pada siswa SMK PGRI 2 Cimahi?
3. Bagaimana dampak penanaman nilai anti korupsi di SMK PGRI 2 Cimahi?

D. Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkapkan penerapan Pendidikan antikorupsi. Sedangkan secara khusus tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan sebagai berikut :

1. Mengetahui pemahaman siswa mengenai nilai-nilai anti korupsi di SMK PGRI 2 Cimahi
2. Mengetahui program pendukung penanaman karakter anti korupsi pada siswa SMK PGRI 2 Cimahi
3. Mengetahui dampak penanaman nilai anti korupsi di SMK PGRI 2 Cimahi

E. Manfaat Penelitian

1. Penelitian Teoritis

Penelitian ini secara teoritis mengembangkan konsep ilmu pendidikan dalam kajian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang berkaitan dengan Pendidikan Anti Korupsi yang memberikan pemahaman mengenai pendidikan anti korupsi kepada peserta didik melalui pembelajaran PPKn serta dapat dijadikan sebagai sumber atau bahan referensi pembandingan bagi peneliti yang ingin mengkaji mengenai masalah yang relevan untuk mendukung perkembangan ilmu pengetahuan khususnya pada mata pelajaran PPKn.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Sekolah Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi sekolah untuk lebih meningkatkan dan mendukung upaya guru dalam menerapkan pendidikan anti korupsi kepada peserta didik.
- b. Bagi Peneliti Untuk mengetahui tentang Peran Guru PPKn dalam Menerapkan Pendidikan Anti Korupsi Kepada Peserta Didik di SMK PGRI 2 Cimahi.
- c. Bagi Guru Dapat dijadikan sebagai bahan masukan guru untuk dapat lebih efektif dalam memberikan penguatan nilai-nilai anti korupsi kepada peserta didik. Bagi Peserta Didik Dapat dijadikan sebagai bahan masukan kepada peserta didik untuk dapat lebih semangat dalam menanamkan rasa jujur, disiplin dan bertanggung jawab.

F. Struktur Organisasi Skripsi

Skripsi ini terdiri dari lima bab yang tersusun secara sistematis, yaitu :

1. Bab I Pendahuluan

Berisikan Latar belakang, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

2. Bab II kajian Teori, Kerangka Berpikir dan Penelitian Terdahulu

Memuat teori-teori yang relevan dengan penelitian, Hasil-hasil penelitian sebelumnya, kerangka berpikir

3. Bab III Metodologi Penelitian

Menjelaskan metode penelitian yang digunakan, meliputi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, Teknik pengumpulan data serta Teknik analisis data.

4. Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Menyajikan hasil penelitian yang diperoleh serta analisis dan pembahasannya secara rinci

5. Bab V Penutup

Berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang dapat diberikan berdasarkan temuan penelitian.

Selain itu, skripsi ini juga dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran sebagai penunjang.

BAB II

KAJIAN TEORI, KERANGKA BERPIKIR DAN PENELITIAN TERDAHULU

A. Kajian Pendidikan Antikorupsi

1. Pengertian Pendidikan

Pendidikan Nasional Indonesia Menurut Ki Hajar Dewantara yang 11 dikemukakan oleh Ab dan Firman (2019) di definisikan sebagai arti Pendidikan; “Pendidikan yaitu tuntutan didalam hidup tumbuhnya anak-anak, adapun maksudnya, pendidikan menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya”. Pendidikan adalah sebuah proses humanime yang selanjutnya dikenal dengan istilah memanusiakan manusia. Oleh karena itu kita seharusnya bisa menghormati hak asasi setiap manusia. Murid dengan kata lain siswa bagaimanapun bukan sebuah manusia mesin yang dapat diatur sekehendaknya, melainkan mereka adalah generasi yang perlu kita bantu dan memberi kepedulian dalam setiap reaksi perubahannya menuju pendewasaan supaya dapat membentuk insan yang swantrata, berpikir kritis seta memiliki sikap akhlak yang baik. Untuk itu pendidikan tidak saja membentuk insan yang berbeda dengan sosok lainnya yang dapat beraktifitas menyantap dan meneguk, berpakaian serta memiliki rumah untuk tinggal hidup, ihwal inilah disebut dengan istilah memanusiakan manusia.

Demikian pentingnya suatu pendidikan dalam upaya memberantas kebodohan memerangi kemiskinan kehidupan bangsa, meningkatkan taraf hidup seluruh lapisan warga, dan membangun harkat negara dan bangsa, maka dari itu pemerintah berusaha dalam memberikan perhatian yang sungguh-sungguh untuk mengatasi berbagai masalah di bidang peningkatan pendidikan mulai dari tingkat dasar, menengah, hingga perguruan tinggi. Perhatian tersebut diantaranya ditunjukkan dengan penyediaan alokasi anggaran yang sangat berarti, serta membuat aturan

kebijakan yang berkaitan dengan usaha peningkatan kualitas. Bahkan yang lebih penting lagi adalah terus melakukan terobosan dan inovasi bermacam ragam upaya untuk menumbuhkan peluang bagi warga dan khalayak umum guna memperoleh pengajaran dari semua tingkat satuan Pendidikan (Yayan, 2019). Karena proses belajar mengajar adalah bagian terpenting guna membangun kualitas sebuah negara. Semakin meningkat kualitas pendidikan maka semakin maju pula bangsa itu. Dalam “Undang-undang nomor 20 Tahun 2003” tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 3 tujuan Pendidikan nasional adalah “mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri serta menjadi warga negara yang demokratis juga bertanggung jawab” (Undang-Undang Republik Indonesia, 2023).

1. Definisi Pendidikan dalam pengertian luas dan sempit

1) Pendidikan dalam pengertian luas

Dalam Perundang-undangan tentang Sistem Pendidikan No.20 tahun 2003, mengatakan bahwa Pendidikan merupakan “usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan sepiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat” (Undang-Undang, Tentang Sistem Pendidikan, 2003). Definisi dari Kamus Bahasa Indonesia (KBBI) kata pendidikan berasal dari kata ‘didik’ serta mendapatkan imbuhan ‘pe’ dan akhiran ‘an’, sehingga kata ini memiliki pengertian sebuah metode, cara maupun tindakan membimbing. Dapat didefinisi pengajaran ialah sebuah cara perubahan etika serta prilaku oleh individu atau sosial dalam upaya mewujudkan kemandirian dalam rangka mematangkan atau mendewasakan manusia melalui upaya pendidikan, pembelajaran, bimbingan serta pembinaan. Definisi pendidikan dalam arti luas adalah Hidup. Artinya bahwa pendidikan adalah seluruh

pengetahuan belajar yang terjadi sepanjang hayat dalam semua tempat serta situasi yang memberikan pengaruh positif pada pertumbuhan setiap makhluk individu. Bahwa pendidikan berlangsung selama sepanjang hayat (*long life education*). Pengajaran dalam pengertian luas juga merupakan sebuah proses kegiatan mengajar, dan melaksanakan pembelajaran itu bisa terjadi di lingkungan manapun dan kapanpun (Amirin, 2013). Secara harfiah arti pendidikan adalah mendidik yang dilaksanakan oleh seorang pengajar kepada peserta didik, diharapkan orang dewasa pada anak-anak untuk bisa memberikan contoh tauladan, pembelajaran, pengarahan, dan peningkatan etika-akhlak, serta menggali pengetahuan setiap individu. Pengajaran yang diberikan pada peserta didik bukan saja dari pendidikan formal yang dilaksanakan oleh pemegang kekuasaan, namun dalam hal ini fungsi keluarga serta masyarakatlah yang amat penting dan menjadi wadah pembinaan yang bisa membangkitkan serta mengembangkan pengetahuan serta pemahaman (Ab & Firman, 2019)

2) Definisi Pendidikan dalam arti sempit

Pendidikan dalam arti kata sempit adalah sebuah Sekolah. Sistem itu berlaku untuk orang dengan berstatus sebagai murid yaitu siswa di sekolah, atau peserta didik pada suatu universitas (lembaga pendidikan formal). Bapak pendidikan Ki Hajar Dewantara dengan pedomannya yang masyur yaitu, “Ing Ngarso Sung Tulodo”(di depan memberikan contoh), “Ing Madyo Mangun Karso”(di tengah membangun dan memberi semangat), Tut Wuri Handayani (di belakang memberi dorongan) dan (Febriyanti, 2021).Seandainya kita dapat memahami isi semboyan tersebut, oleh karenanya bias disimpulkan bahwa peran guru sebagai pondasi dan ujung tombak dalam melaksanakan laju Pendidikan Nasional. Pendidikan merupakan segala efektivitas yang diusahakan sebuah lembaga kepada peserta didik untuk diberikan kepadanya dengan harapan mereka memiliki kompetensi yang baik dan jiwa kesadaran penuh terhadap suatu

ikatan dan permasalahan sosialnya, Dalam kegiatan pengajaran disekolah atau lembaga formal terdapat batasan akhir masa belajar atau waktu tempuh dalam mengikuti pembelajaran sangat bervariasi, misalnya tiga tahun, enam tahun dan sebagainya.

2. Pengertian korupsi

Kata “Korupsi” berasal dari bahasa latin “*Corruptio*” menurut Fackema Andrea : 1951 atau “*Corruptus*” menurut Webster Student Dictionary : 1960 dalam (Junaidin, Husna, & Irma , 2022). Selanjutnya dikatakan bahwa “*Corruption*” berasal dari kata “*Corrumpere*”, suatu bahasa latin yang lebih tua. Dari bahasa latin tersebut kemudian dikenal istilah “*Corruption, Corruptie*” (Inggris), “*Corruption*” (Perancis) dan “*Corruptie/Korruptie*” (Belanda). Arti kata korupsi secara harfiah adalah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidak jujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian . Istilah korupsi yang telah diterima dalam perbendaharaan kata bahasa Indonesia, adalah “kejahatan, keburukan, dapat disuap, tidak bermoral, kejahatan, dan ketidak jujuran” (Rasyidi, 2020).

Korupsi adalah perilaku yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan public atau posisi otoritas untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kepentingan yang tidak sah. Bentuk-bentuk korupsi dapat bervariasi, mulai dari penerimaan suap, pemerasan, nepotisme, hingga manipulasi illegal dalam pengambilan keputusan. Esensi dari korupsi adalah penggunaan kekuasaan atau kepercayaan public untuk keuntungan pribadi yang tidak adil (Arnie, 2024)

Korupsi sendiri adalah merupakan bagian dari buruknya nilai moral yang menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi. Menurut (Joao & Ronaldo, 2022) ada tiga sebab yang melatar belakangi tindak pidana korupsi yaitu: “*relationship between unethical behavior, dishonest behavior and corrupt*”. Korupsi menjadikan pelakunya menginginkan menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan individu, kelompok atau politik sehingga dia melakukan sikap yang tidak etik dan

mencederai bahkan profesinya. Hal tersebut sangat di dukung oleh sikap dan perilaku tidak jujur sehingga tindak korupsi menghilangkan tatanan moral yang ada dalam dirinya. Maka penguatan karakter yang menguatkan nilai kejujuran dan menjunjung tinggi etika dapat menekan sikap tidak jujur dan tidak memiliki prinsip etika.

Korupsi dapat menimbulkan berbagai dampak negative, termasuk ketidaksetaraan ekonomi, pelayanan publik yang buruk, dan kerugian kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik dan hukum. Korupsi juga dapat menghambat pembangunan sosial, mengurangi akses terhadap layanan kesehatan dan Pendidikan, serta memperburuk kondisi kemiskinan (Treisman, 2007)

Korupsi dalam konteks Pendidikan adalah tindakan untuk mengendalikan atau mengurangi serta mencegah sebelum ada niat (pre-emptif) dan sudah ada niat (preventif) untuk tidak melakukan korupsi. Karena itu Pendidikan anti korupsi dimaksud merupakan keseluruhan upaya untuk mendorong generasi-generasi mendatang mengembangkan sikap menolak secara tegas setiap bentuk tindakan korupsi. Pendidikan anti korupsi sangat penting dilakukan melalui jalur Pendidikan, karena Pendidikan adalah usaha sadar untuk merubah perilaku seseorang termasuk peserta didik calon pemimpin masa depan (*student are today, leadaers are tomorrow*) dengan harapan agar generasi muda secara sadar mampu membangun sistem nilai antikorupsi yang melekat pada jiwa dan karakter anti korupsi pada dirinya (Arnie, 2024).

Selanjutnya untuk beberapa pengertian lain, di sebutkan bahwa (Muhammad Ali, 1998) dalam (Junaidin, Husna, & Irma , 2022):

1. Korup artinya busuk, suka menerima uang suap/sogok, memakai kekua-saan untuk kepentingan sendiri dan sebagainya;
2. Korupsi artinya perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya, dan
3. Koruptor artinya orang yang melakukan korupsi. Dengan demikian arti kata korupsi adalah sesuatu yang busuk, jahat dan merusak,

berdasarkan kenyataan tersebut perbuatan korupsi menyangkut; sesuatu yang bersifat amoral, sifat dan keadaan yang busuk, menyangkut jabatan instansi atau aparatur peme-rintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, mengangkut faktor ekonomi dan politik dan penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatan.

B. Pengertian Antikorupsi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008), korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Korupsi di Indonesia merupakan fenomena memprihatinkan yang pemberantasannya telah diupayakan dengan berbagai cara, namun hingga saat ini korupsi masih terjadi bahkan dilakukan oleh oknum-oknum pejabat negara hingga aparat penegak hukum. Korupsi merugikan keuangan negara, menyengsarakan masyarakat dengan meningkatnya kemiskinan dan kesenjangan sosial, serta menghambat pertumbuhan ekonomi negara serta merusak moral suatu bangsa. Oleh karena itu, upaya pemberantasan korupsi harus tetap diupayakan mulai dari penanaman nilai-nilai anti korupsi, pembiasaan budaya jujur dalam kehidupan sehari-hari hingga penegakan hukum yang tegas. Pada Pendidikan formal, upaya pemberantasan tindakan korupsi dapat dilakukan dengan upaya preventif yang ditanamkan sejak dini bagi peserta didik sebagai generasi penerus melalui penetrasi nilai-nilai anti korupsi, nilai-nilai kejujuran beserta contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini penting bagi masyarakat agar memiliki pemahaman dasar mengenai pengertian korupsi beserta bentuk-bentuk korupsi itu sendiri. (Monalisa, Rince, & Hotmaid, 2024)

Antikorupsi adalah segala bentuk tindakan, sikap, dan kebijakan yang bertujuan untuk mencegah, menolak, dan memberantas praktik korupsi. Tindakan antikorupsi mencakup pendidikan, penegakan hukum, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Nilai-nilai antikorupsi seperti kejujuran, integritas, tanggung

jawab, dan kepedulian sangat penting dalam membangun budaya bersih dari korupsi (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2020). Korupsi maupun perilaku koruptif telah terbukti menimbulkan dampak buruk yang sangat besar bagi masyarakat luas. Kemiskinan dan kondisi perekonomian yang buruk, kelaparan dan kondisi kesehatan masyarakat yang buruk, kerusakan lingkungan, infrastruktur yang tidak memadai, kualitas pendidikan yang tidak memenuhi standar, kondisi politik dan demokrasi yang tidak sehat, buruknya birokrasi di pemerintahan serta penegakan hukum yang tidak adil, antara lain disebabkan oleh korupsi di berbagai bidang maupun perilaku-perilaku koruptif di dalam masyarakat (Widati, et al., 2018).

C. Pengertian Pendidikan Anti Korupsi

Pendidikan anti korupsi adalah salah satu upaya yang dilakukan oleh otoritas publik dalam menanamkan musuh watak kehinaan pada siswa di lingkungan sekolah. Penghinaan itu sendiri bukanlah demonstrasi yang merugikan banyak individu dengan memanfaatkan posisi untuk penambahan individu. Kekotoran batin yang dilakukan dengan cara-cara yang tidak sesuai standar, misalnya membayar, pemerasan dan pemerasan dapat terjadi di wilayah otoritas publik yang akan berubah menjadi infeksi yang memusnahkan seluruh bagian kehidupan (Hamilton-Hart, 2001).

Pendidikan anti korupsi meliputi berbagai kegiatan, seperti penyuluhan, pelatihan, kurikulum Pendidikan, dan program-program pengembangan kapasitas. Tujuannya adalah untuk mempengaruhi sikap, nilai, dan perilaku individu sejak dini, mulai dari tingkat Pendidikan dasar hingga tingkat Pendidikan tinggi, serta melibatkan berbagai stakeholder, termasuk guru, siswa, orang tua, dan komunitas lokal. (OECD, 2007)

Pada dasarnya, pelatihan permusuhan terhadap kemerosotan dapat diartikan sebagai program instruktif yang menjelaskan dan mengalahkan kekotoran batin yang berbeda yang terjadi secara lokal dengan menanamkan musuh jiwa kemerosotan pada waktu yang tepat dengan niat penuh untuk membangun dan memperluas keakraban penduduk dengan risiko dan hasil demonstrasi. dari

kekotoran. Sekolah bermusuhan dengan kemerosotan memiliki tiga tujuan, pertama, untuk membentuk informasi dan pemahaman tentang jenis-jenis kekotoran batin dan perspektifnya. Kedua, mengubah penegasan dan perspektif menuju kemerosotan. Ketiga, membingkai kemampuan dan kemampuan baru yang ditujukan untuk memerangi kemerosotan (Hakim, 2012).

Pendidikan anti korupsi merupakan bagian atau insan dari Pendidikan karakter, yang lebih fokus untuk mengembangkan ilia-nilai anti korupsi. Nilai-nilai anti korupsi berfungsi untuk mengarahkan, mengendalikan, dan menentukan kelakuan seseorang, karena nilai dijadikan standar perilaku yang baik. Menurut KBBI online 2017, “nilai diartikan sebagai pribadi yang utuh, misalnya kejujuran, nilai yang berhubungan dengan akhlak, nilai yang berkaitan dengan benar dan salah yang dianut oleh golongan atau amasyarakat”. Oleh karena itu pembinaan pengembangan nilai-nilai anti korupsi melalui Pendidikan mmerupakan wahana untuk mensosialisasikan dan menginternalisasikan nilai-nilai anti korupsi dalam diri seseorang agar menjadi sikap dan perilaku anti korupsi. Anti korupsi dilihat dalam konteks Pendidikan adalah tindakan untuk mengendalikan atau mengurangi korupsi, merupakan keseluruhan upaya untuk mendorong generasi-generasi mendatang mengembangkan sikap menolak secara tegas setiap bentuk tindak korupsi (Buchori, Muchtar, 2007).

Pendidikan anti korupsi dengan mengembangkan pembentukan karakter anti korupsi pada prinsipnya mendapat tantangan besar dari kondisi korupsi yang saat ini sudah begitu membudaya dan mengakar daging namun pembentukan karakter anti korupsi ini harus terus menerus diupayakan sebagai bentuk Ibid. korupsi di masa mendatang. Dengan membentuk kembali karakter anti korupsi pada generasi muda maka akan mengembalikan nilai-nilai anti koruptif sehingga dapat membantu upaya pencegahan tindak pidana korupsi di masa mendatang.

Korupsi secara umum merujuk pada sifat dan perilaku atau tindakan yang cenderung atau mengarah pada korupsi dan pendidikan anti korupsi adalah proses pembelajaran yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai kejujuran, integritas, tanggung jawab dan transparansi kepada peserta didik agar mereka

memiliki sikap dan perilaku yang menolak segala bentuk korupsi (Komisi P. K., 2012). Pendidikan anti koruptif tidak dirancang untuk memberantas korupsi tanpa mencegah dengan jalan melatih orang untuk memiliki kesadaran untuk berperilaku anti korupsi. Pendidikan anti korupsi tidak akan memiliki daya guna jika karakter yang terbentuk masih bukan karakter anti korupsi.

Korupsi adalah permasalahan yang menyerang lembaga publik merupakan indikasi dari buruknya pemerintahan suatu negara menurut Helmi Umam “mampu menyelewengkan penegakan hukum, mampu menggoyahkan stabilitas politik, mampu memporak-porandakan nasionalisme” dan terlebih lagi dapat menghancurkan perekonomian bangsa (Umam, 2013). Selanjutnya, kasus yang sering terjadi dalam korupsi menurut Helmi Umam adalah *rishwah* yaitu praktik menyuap dengan menggunakan posisinya sebagai pegawai publik.

Kekuasaan menurut Nietzsche semakin kuat suatu kekuasaan maka akan menekan kepada yang lemah. Kekuasaan akan memberikan kecenderungan untuk bertindak tidak berdasarkan kepada etika dalam menekan mereka yang lebih lemah (Hilman, 2004). Korupsi sebagai tindakan penyalahgunaan kekuasaan mencerminkan perilaku tidak peduli terhadap kondisi yang dianggap lemah dari dirinya sehingga menggunakan kekuasaan tersebut untuk kepentingannya, seperti pendapat Nietzsche yang disebut sebagai “*development failures*” yaitu pemerintah gagal dalam mewakili masyarakat yang berdada di dalam kekuasaannya (Hilman, 2004).

Korupsi adalah merupakan tindak pelanggaran terhadap hukum “*crime is a sin consisting in the committing by deed or word of that which the law forbiddeth, or the omission of what it hath commanded. So that every crime is a sin; but not every sin a crime*” (Hobbes, 1987, hlm 108). Thomas Hobbes berpendapat bahwa tindak pelanggaran terhadap hukum yang telah di tentukan oleh negara adalah salah satu perbuatan yang salah. Korupsi adalah merupakan pelanggaran terhadap hukum dan juga merupakan dosa. Pendapat tersebut menjelaskan bahwa segala pelanggaran hukum adalah merupakan kejahatan.

Oleh karena itu dalam pendidikan anti korupsi, pemahaman tentang nilai-nilai korupsi sebagai nilai-nilai yang negatif dan merugikan banyak pihak sangatlah penting diberikan. Dengan pemahaman demikian maka akan terbentuk karakter anti korupsi. Pembentukan karakter anti korupsi yang dilakukan melalui pendidikan anti korupsi akan mempertajam dan mengasah idealisme dan integritas yang dimiliki oleh generasi muda dalam memandang korupsi sebagai perbuatan melawan hukum yang harus segera dicegah, ditanggulangi dan diberantas karena dapat mengakibatkan kerugian yang sifatnya materil maupun immateril.

D. Pendidikan anti korupsi dalam sistem pendidikan nasional

Pendidikan memiliki suatu peran penting dalam pembentukan karakter daripada suatu bangsa. Melalui pendidikan seringkali muncul harapan tentang kesejahteraan di berbagai bidang. Secara terminology, pendidikan berasal dari kata paideia (pedagogi), artinya pembentukan generasi muda agar menjadi manusia yang berbudaya dan mampu mengambil bagian dalam kehidupan di tengah masyarakat. Pendidikan sebagaimana diungkapkan oleh Ki Hajar Dewantara memiliki tujuan untuk menumbuhkan peserta didik menjadi manusia yang luhur akal budinya. Pendidikan yang berbudi luhur adalah pendidikan yang ingin mengantar peserta didik menjadi generasi muda yang memiliki keutamaan moral – bijaksana, tangguh, adil, ughari. Dan memiliki keutamaan teologial: iman, harapan dan kasih. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pendidikan merupakan salah satu sarana ideal dalam menumbuhkembangkan karakter seseorang agar lebih berbudaya dan bermartabat sebagai manusia. Dalam kaitannya dengan pencegahan korupsi, maka pembentukan karakter haruslah menjadi dasar utama pendidikan anti koruptif. Tanpa adanya dasar utama pembentukan karakter maka tujuan dilaksanakannya pendidikan anti koruptif pun akan menjadi sia-sia (Donny , 2002).

Pendidikan antikorupsi adalah upaya untuk menyadarkan masyarakat tentang bahaya dan dampak negatif korupsi serta mempromosikan sikap, nilai,

dan perilaku yang menciptakan budaya integritas dan transparansi. Pendidikan antikorupsi bertujuan untuk membentuk kesadaran moral, meningkatkan pemahaman tentang prinsip-prinsip etika, serta membekali individu dengan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk menghindari dan melawan korupsi. (UNESCO, 2008)

Pendidikan antikorupsi meliputi berbagai kegiatan, seperti penyuluhan, pelatihan, kurikulum pendidikan, dan program-program pengembangan kapasitas. Tujuannya adalah untuk mempengaruhi sikap, nilai, dan perilaku individu sejak dini, mulai dari tingkat pendidikan dasar hingga tingkat pendidikan tinggi, serta melibatkan berbagai stakeholder, termasuk guru, siswa, orang tua, dan komunitas lokal. (OECD, 2007). Pendidikan antikorupsi juga bertujuan untuk mengembangkan kemampuan kritis dan analitis individu dalam memahami dan menilai situasi-situasi yang melibatkan korupsi. Melalui pendidikan antikorupsi, individu diajak untuk memahami konsekuensi sosial, ekonomi, dan politik dari tindakan korupsi serta pentingnya mempromosikan keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap aspek kehidupan. (Coalition, 2016)

Pendidikan antikorupsi juga dapat dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan formal, baik sebagai mata pelajaran terpisah maupun sebagai bagian integral dari mata pelajaran yang ada, seperti studi sosial, kewarganegaraan, atau moral dan agama. Dengan memasukkan pendidikan antikorupsi ke dalam kurikulum, pentingnya integritas, etika, dan tanggung jawab sosial dapat dipromosikan secara terstruktur dan berkelanjutan (Lind, 2012). Pendidikan antikorupsi bukan hanya tentang meningkatkan kesadaran, tetapi juga tentang memberikan keterampilan dan alat yang diperlukan untuk bertindak secara etis dan mengatasi tekanan atau godaan korupsi. Dengan memberdayakan individu dengan pengetahuan dan keterampilan ini, mereka dapat menjadi agen perubahan dalam memerangi korupsi dan membangun masyarakat yang lebih adil dan berintegritas.

Pendidikan antikorupsi mencakup berbagai aspek yang dirancang untuk menyadarkan, membekali, dan mendorong individu untuk menghindari dan

melawan korupsi. Ini meliputi pembentukan kesadaran tentang bahaya korupsi, pemahaman tentang nilai-nilai etika dan integritas, serta pengembangan keterampilan dan sikap yang diperlukan untuk mempromosikan transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam berbagai konteks. (UNODC, 2013). Salah satu aspek utama dari ruang lingkup pendidikan antikorupsi adalah penyuluhan dan kampanye publik yang bertujuan untuk menyadarkan masyarakat tentang bahaya dan konsekuensi korupsi. Ini melibatkan penyampaian informasi yang jelas dan mudah dipahami tentang cara-cara korupsi terjadi, dampak negatifnya, serta peran individu dalam mencegah dan melawan korupsi. (UNESCO, 2008)

Selain itu, pendidikan antikorupsi juga mencakup pengembangan kurikulum pendidikan formal dan non-formal yang mencakup aspek-aspek etika, integritas, dan pencegahan korupsi. Ini melibatkan integrasi materi tentang korupsi ke dalam mata pelajaran yang ada, serta pengembangan program-program pendidikan khusus yang menekankan nilai-nilai antikorupsi. (OECD, 2007). Ruang lingkup pendidikan antikorupsi juga mencakup pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi para profesional, termasuk guru, pegawai negeri, dan pemimpin masyarakat. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang korupsi, memperkuat keterampilan dalam mengidentifikasi, melaporkan, dan mencegah tindakan korupsi, serta membangun komitmen untuk bertindak secara etis dan bertanggung jawab. (Europe, 2012)

Pendidikan antikorupsi sebagai bagian dari upaya pembentukan karakter bangsa memiliki dasar hukum yang kuat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas). Dalam **Pasal 3** UU Sisdiknas ditegaskan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang *beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab*. Nilai-nilai ini secara eksplisit mencerminkan prinsip-prinsip pendidikan antikorupsi seperti integritas, tanggung jawab, dan akuntabilitas. Selanjutnya, **Pasal 4 ayat (1)** menyebutkan bahwa pendidikan

diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai budaya, dan kemajemukan bangsa. Prinsip-prinsip tersebut sejalan dengan semangat pendidikan antikorupsi yang menekankan pada keadilan sosial dan etika publik. Lebih lanjut, **Pasal 37 ayat (1)** menjelaskan bahwa kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat mata pelajaran Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, dan Bahasa, yang semuanya merupakan wahana strategis untuk menyisipkan nilai-nilai antikorupsi. Oleh karena itu, implementasi pendidikan antikorupsi dapat dilakukan baik melalui kurikulum terintegrasi dalam mata pelajaran yang telah ada maupun sebagai mata pelajaran mandiri yang secara eksplisit mengajarkan etika, integritas, serta konsekuensi hukum dan sosial dari tindakan korupsi. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan antikorupsi bukanlah konsep yang berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian integral dari sistem pendidikan nasional yang bertujuan membentuk warga negara yang bermoral, cerdas, dan bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tentang Sistem Pendidikan Nasional)

Selain itu, pendidikan antikorupsi juga mencakup pengembangan program-program pengawasan dan monitoring yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi perilaku pemerintah dan lembaga-lembaga publik. Ini mencakup promosi akses terhadap informasi, mekanisme pengaduan, serta pengembangan kapasitas masyarakat sipil dalam memperjuangkan transparansi dan akuntabilitas. Dengan mencakup aspek-aspek ini, pendidikan antikorupsi memiliki ruang lingkup yang luas dan mencakup berbagai dimensi, mulai dari penyuluhan dan pendidikan formal hingga pelatihan profesional dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemerintah. Hal ini menegaskan pentingnya pendidikan antikorupsi sebagai bagian integral dari upaya untuk

Berkaitan dengan pentingnya pendidikan anti korupsi, KPK sebagai lembaga yang ditugaskan dalam hal penanggulangan korupsi memberikan respon positif dengan berperan aktif mengembangkan edukasi-edukasi anti

koruptif, melalui KPK laman telah menyediakan ragam edukasi anti korupsi bagi setiap masyarakat dengan menyediakan bacaan-bacaan, metode games dan audio visual untuk lebih memudahkan setiap masyarakat mempelajari nilai-nilai anti korupsi. Di laman tersebut setiap masyarakat dapat mengakses kebutuhan pengetahuannya melalui fitur-fitur pilihan edukasi. Dalam hal ini nampak terlihat usaha KPK untuk menyentuh generasi muda yang melek teknologi (generasi milenial) untuk belajar secara aktif tentang korupsi dan nilai-nilai menyakini anti korupsi. KPK bahwa ditanggulangi secara korupsi integral harus dan menyeluruh, tidak hanya terbatas pada penegakan hukum semata melainkan membentuk karakter anti korupsi melalui dunia pendidikan (Gusti Ayu, 2016).

E. Perilaku Anti Korupsi

Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan atau apa yang boleh dilakukan serta yang dilarang. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang yang nyata-nyata berbuat melawan hukum, melainkan juga perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi, dan kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum. Sistem bekerjanya hukum yang demikian itu merupakan salah satu bentuk penegakan hukum. Menurut Dossy Iskandar Prasetyo dan Bernard L. Tanya mengemukakan bahwa etika memiliki peran sangat sentral bagi peradilan pidana yang masuiawi (Dossy & Bernard L, 2011).

Korupsi di negara Indonesia sudah dalam tingkat kejahatan korupsi politik. Kondisi Indonesia yang terserang kanker politik dan ekonomi sudah dalam stadium kritis. Penyakit korupsi terus menggerogoti saraf vital dalam tubuh negara Indonesia, sehingga terjadi krisis institusional. Korupsi politik dilakukan oleh orang atau institusi yang memiliki kekuasaan politik, atau oleh konglomerat yang melakukan hubungan transaksional kolusif dengan pemegang kekuasaan. Dengan demikian, praktik kejahatan luar biasa berupa kejahatan ini berlangsung secara sistematis (Evi, Tindakan Pidana Korupsi, 2009).

Keberhasilan KPK dalam mengungkap berbagai kasus korupsi di Indonesia menimbulkan beberapa pertanyaan. Apakah korupsi di Indonesia akan tuntas atau apa yang telah dilakukan oleh KPK merupakan suatu permulaan dari sebuah upaya yang sudah cukup menelan biaya banyak dalam memberantas korupsi ?. Pernyataan berbagai lembaga survey korupsi baik yang berkapasitas Internasional ataupun nasional tentang buruknya korupsi di Indonesia dan mencuatnya berbagai pemberitaan di media masa kemudian dengan adanya tuntutan keseriusan pemberantasan korupsi di daerah-daerah yang dilakukan oleh masyarakat, hal itu semua mengindikasikan adanya suatu "fenomena gunung es" terhadap masalah korupsi di Indonesia. Selain dari pada kontrol yang dilakukan oleh berbagai pihak di atas, hal yang sangat perlu juga di perhatikan yaitu kesadaran diri masyarakat. Peran masyarakat untuk berperilaku (Bagdawansyah, Kurniawansyah, & Ahmad, 2021).

Korupsi tidak hanya mempunyai dimensi formal sebagaimana yang dideskripsikan oleh KPK, namun juga memiliki dimensi politis, sosiologi, ekonomi, dan pedagogis. Meskipun korupsi bersifat multidimensi, persamaan yang mendasari perbedaan dimensi tersebut adalah etika. Korupsi merupakan suatu tindakan yang menyimpang dan melanggar etika serta merugikan pihak lain.

Berikut disajikan empat dimensi korupsi yang bukan merupakan dimensi formal, dan saling melengkapi antara satu dengan lainnya.

1. Dimensi politik

Salah satu prosedur kelembagaan untuk mencapai keputusan politik adalah demokrasi. Untuk memperoleh suatu keputusan yang demokratis suatu Lembaga harus mengikut sertakan individu untuk memberikan aspirasi. Berdasarkan aspirasi tersebut, setiap individu berhak bersaing dengan sehat dan rasional untuk mendapatkan suara rakyat, misalnya hak setiap individu untuk berkampanye dalam rangka pemilihan umum yang bertujuan untuk mendapatkan simpati dan pengikut yang mendukungnya. Nerkaitan dengan hal ini, Schumpeter (1947:5)

mengemukakan tentang teori demokrasi yang disebut dengan "metode Demokratis", yaitu prosedur kelembagaan untuk mencapai keputusan politik yang di dalamnya individu memperoleh kekuasaan untuk membuat keputusan melalui perjuangan kompetitif dalam rangka memperoleh suara rakyat.

2. Dimensi sosiologi

Pada prinsipnya sosiologi merupakan cabang ilmu. Social yang mempelajari masyarakat dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia, meliputi sifat, perilaku, dan perkembangan masyarakat dalam arti pembangunan. Allan Jhonson (Wikipedia, ensiklopedia bebas-Sosiologi 23/02/2008). Mengemukakan bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari kehidupan dan perilaku, terutama dalam kaitannya dengan suatu sistem social dan bagaimana sistem tersebut memoengaruhi orang ddalam kaitannya dengan suatu sistem social dan bagaimana sistem tersebut mempengaruhi orang ddan bagaiman pula orang yang terllibat did dalamnya memerngaruhi sistem tersebut.

3. Dimensi ekonomi

Korupsi mempersulit pembangunan ekonomi dan mengurangi kualitas pelayanan pemerintahan antara lain dengan membuat distorsi (kekacauan) dan ketidak efisienan yang tinggi. Sebagai contoh dalam sektor privat, korupsi meningkatkan ongkos niaga karena kerugian dari pembayaran ilegal, ongkos manajemen dalam negosiasi dengan pejabat korup. Walaupun terdapat pendapat yang menyatakan bahwa korupsi mengurangi ongkos (niaga) dengan mempermudah birokrasi. Sedangkan di sektor publik korupsi menimbulkan distorsi dengan mengalihkan investasi publik ke proyek-proyek masyarakat dimana suap dan upah tersedia lebih banyak. Baik di sector privat maupun publik, dimungkinkan pejabat membuat aturan-aturan baru dan hambatan baru sebagai tambahan kompleksitas proyek masyarakat untuk menyembunyikan praktek korupsi. Hal ini mengakibatkan lebih banyak kekacauan. Korupsi juga mengurangi pemenuhan syarat-syarat

keamanan bangunan, lingkungan hidup, atau aturan-aturan lain. Korupsi juga mengurangi kualitas pelayanan pemerintahan dan infrastruktur; serta menambahkan tekanan-tekanan terhadap anggaran pemerintah.

4. Dimensi hukum

Keberhasilan pemerintah dan kekuasaan suatu Negara seperti Indonesia adalah bagaimana kebijakan negara mencegah dan memberantas korupsi secara optimal, masalah korupsi pada dasarnya tidak bersandar pada legitimasi hukum saja, tetapi terkait dengan aspek ekonomi, sosial dan politik. Seno Adji (2009) berpendapat bahwa korupsi di Indonesia sudah tersistem (*systemic corruption*) yang melibatkan kelembagaan yang dikategorikan sebagai penyakit yang sulit pembuktiannya bahkan lekat sekali dengan kekuasaan. Sistem harus ditelaah sebagai kesatuan yang meliputi tindakan re-evaluasi, reposisi, dan pembaharuan struktur, substansi hukum khususnya budaya hukum sebagai cermin etika dan integritas penegakan hukum. Budaya hukum merupakan aspek penting yang melihat bagaimana masyarakat menganggap ketentuan sebagai *civic-minded*, sehingga masyarakat selalu taat dan menyadari betapa pentingnya hukum sebagai regulasi.

Praktek korupsi di Indonesia lebih transparan setelah berbagai kasus yang menimpa para politikus secara beruntun terkuak, meskipun dalam penyelesaiannya masih terdapat kendala karena kompleksitas dan keluasan aspek serta konspirasinya. Menurut Laila (2009) paling tidak ada tiga relasi konspirasi yang melakukan intervensi saling menguntungkan terhadap proyekproyek atau berbagai kegiatan. Pertama, antar pejabat dalam suatu instansi pemerintah maupun antar instansi, termasuk di dalamnya melibatkan pejabat di bidang keamanan (militer dan kepolisian). Kedua, antara pejabat dengan pengusaha, dimana para pengusaha karena sudah memiliki jaringan di dalam dan benar-benar mengetahui apa yang dimaui para pejabat itu, selalu saja *survive* kendati terjadi pergantian pejabat dalam lingkungan birokrasi. Ketiga, antara pengusaha dengan pengusaha. Relasi terakhir biasanya

terjadi dalam proses tender proyek, dimana diantara mereka sudah saling mengerti untuk sama “memperoleh jatah” dengan saling membantu atau tidak saling mengganjal. Wujudnya antara lain “pendamping” dalam proses tender tertentu, dimana sang pendamping itu juga sekaligus memperoleh “bagian atau prosentase” dari sang pemenang, sehingga pelaksanaan tender sebenarnya hanya formalitas dan akal-akalan saja.

F. Upaya Pencegahan Tindakan Korupsi

Upaya untuk melawan atau memberantas korupsi tidak hanya dilakukan oleh penegak hukum saja. Sebab, penegak hukum juga tidak ampuh lagi jika dihadapkan dengan orang-orang yang melakukan tindakan korupsi. Jadi, hal yang paling efektif untuk memberantas korupsi adalah melalui dunia pendidikan, dengan memasukkan materi ajaran tentang pendidikan karakter atau nilai-nilai anti korupsi.

Dalam hal ini, Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan (PPKn) memiliki peran sangat penting dalam menanamkan nilai-nilai antikorupsi kepada peserta didik. Melalui PPKn peserta didik diajarkan untuk memahami dan mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila, seperti :

a. Kejujuran

Kejujuran merupakan salah satu karakter penting yang perlu dibangun dan ditanamkan dalam diri setiap masing-masing warga negara. Dalam pembinaannya pendidik bisa memberikan materi-materi atau contoh implementasi dari kejujuran itu sendiri, sehingga peserta didik dapat meniru dan menerapkan hal tersebut. Selain itu, pendidik juga dapat berperan dalam memberikan pemaparan dari dampak ketidakjujuran, misalnya terjadinya tindakan korupsi yang dapat merugikan banyak pihak. Dengan hal tersebut, peserta didik mampu memahami bahwa kejujuran itu penting adanya dan sangat buruk akibatnya apabila tidak ada dalam diri seseorang.

b. Tanggung Jawab

Selain kejujuran, tanggung jawab juga merupakan salah satu karakter yang perlu untuk di tanamkan pada diri setiap orang. Pendidik dapat membina peserta didik, melalui cara mengajarkan bagaimana memelihara amanah ketika di tugaskan dan memberitahu apa dampak dari orang yang tidak bertanggung jawab. Dengan hal tersebut, maka peserta didik dapat menjalankan kehidupannya sesuai dengan apa yang telah di amanahkan dan lebih bertanggung jawab terhadap apa yang ia lakukan, serta dapat terbebas dari perbuatan- perbuatan yang tidak baik, seperti contohnya melakukan suap menyuap dari uang Negara (korupsi) terhadap tugas atau jabatan yang ia tempati.

c. Keberanian Sebagai pendidik

hal yang dapat di terapkan pada diri masing- masing peserta didik adalah melatih atau menanamkan keberanian pada masing- masing anak. Berani untuk mengatakan yang benar dan yang salah karena itu adalah hal paling penting dalam mengembangkan nilai- nilai anti korupsi. Mengapa? Karena dengan adanya keberanian maka peserta didik nantinya dapat berani untuk mengatakan kebenaran terhadap aparat hukum dari perbuatan buruk yang telah dilakukan seseorang, dimana perbuatan itu sendiri sangat merugikan banyak orang, salah satunya adalah korupsi.

d. Keadilan

Keadilan merupakan suatu sikap dimana seseorang mampu menempatkan sesuatu pada tempatnya sesuai dengan kebutuhannya. Keadilan pada warga negara perlu dibina dan ditindaklanjuti sejak dini agar tertanam dalam diri warga negara sikap keadilan. Jika dalam diri seorang warga negara sudah tertanam sikap keadilan, maka kehidupan berbangsa dan bernegara akan semakin harmonis, dengan penegak-penegak hukum dan masyarakat yang saling memahami posisi hak dan kewajibannya masing masing. Dengan pengamalan sikap adil yang baik pada warganegara maka tindakan kecurangan atau korupsi akan semakin berkurang dan lama kelamaan akan hilang.

e. Kesederhanaan

Kesederhanaan juga perlu untuk diterapkan dalam dunia pendidikan, terutama pendidikan Anti Korupsi. Karena dengan diterapkannya pendidikan karakter kesederhanaan tersebut maka dapat membuat para peserta didik terjauhkan dari perbuatan korupsi. Terjadinya perbuatan korupsi sudah tentu dikarenakan orang-orang yang menginginkan kehidupan penuh dengan kemewahan tetapi merugikan banyak orang. Dengan diajarkannya pendidikan karakter salah satunya yaitu kesederhanaan diharapkan dapat menumbuhkan para generasi muda yang Anti Korupsi. (Sumiarti, 1970)

G. Pendidikan kewarganegaraan sebagai Nilai-nilai Pendidikan antikorupsi

pendidikan kewarganegaraan berorientasi membentuk warga negara yang cerdas, baik, dan mampu menjadi warga negara global, tanpa meninggalkan identitas kebangsaannya. Mengingat bahwa paham kebangsaan atau nasionalisme tetap memegang peranan penting di era global dalam konsep *nation state* (negara bangsa) dan nasionalisme yang memiliki otoritas dan kedaulatan pada setiap warga negara, sebagaimana dikemukakan oleh (Widya & Anggraeni, 2024) bahwa nasionalisme adalah ideologi yang menekankan bangsa sebagai prinsip sentral dari organisasi politik dengan pelbagai cita-cita dan tujuan. Oleh karena itu, di tengah derasnya arus globalisasi, jati diri bangsa Indonesia tidak boleh larut dalam gempuran budaya yang merusak kesatuan dan persatuan bangsa. Budaya nasional yang berakar dari budaya lokal harus tetap ditanamkan di tengah gencarnya pengaruh global yang tidak semuanya berpengaruh positif terhadap eksistensi bangsa ini. Untuk itu, upaya menanamkan nasionalisme dalam konteks dinamika perubahan saat ini harus tetap harus diupayakan perumusan strategi ataupun wahananya yang efektif dan efisien, khususnya yang menarik perhatian generasi muda demi keberlangsungan bangsa dan negara Indonesia (Lestari, 2019).

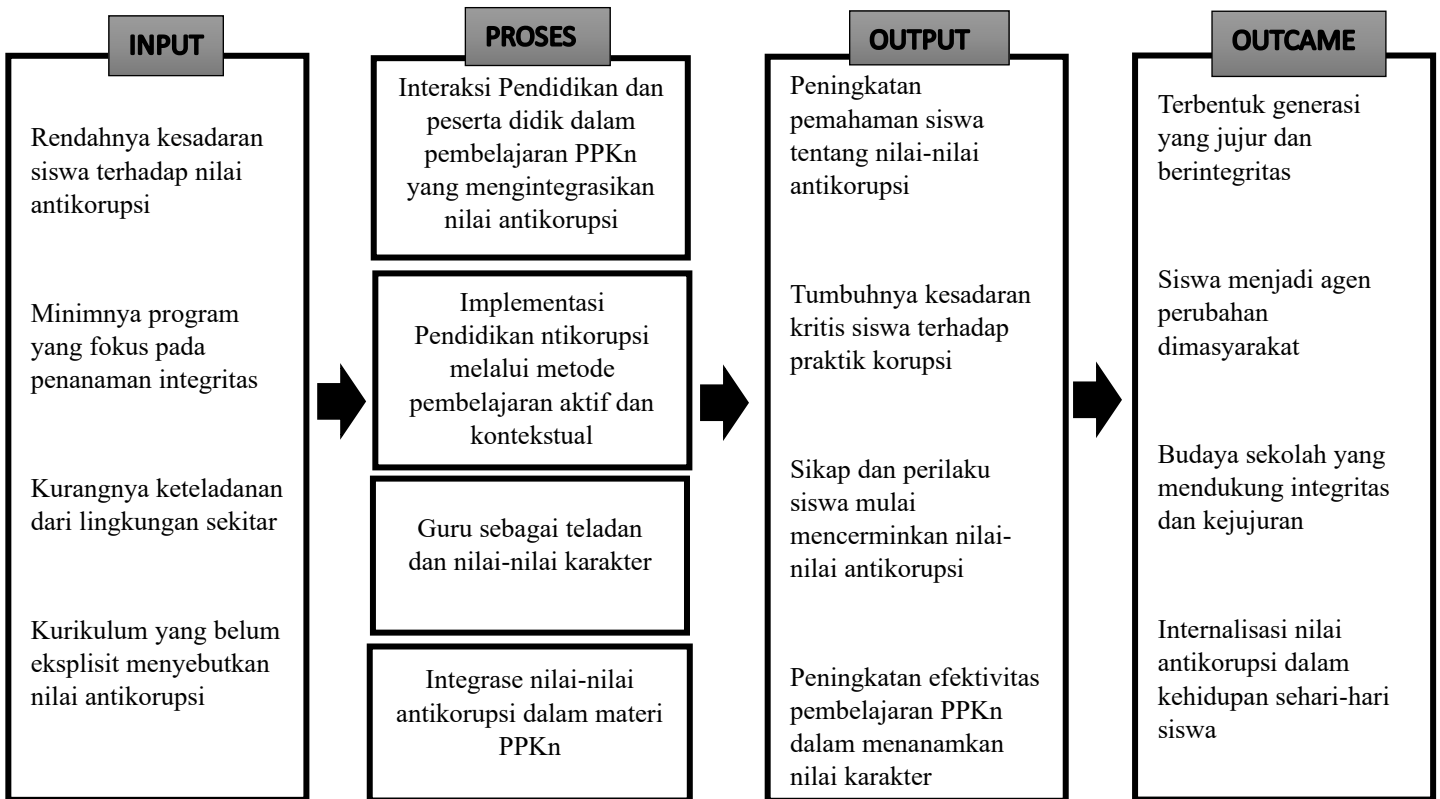
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) terhadap sikap nilai-nilai antikorupsi memiliki pengaruh, melihat dari uji asumsi klasik (normalitas

dan linieritas) pada berdistribusi normal dan dinyatakan linier pada kedua variabel. Selain itu, dari hasil uji hipotesis terungkap bahwa variabel atau pembelajaran sebelumnya, pemberian motivasi, membimbing siswa, berpengaruh terhadap skor Nilai antikorupsi Menurut teori Lickona, ada senang tahu (*feel good*), senang senang (*desire*). baik) dan berbuat baik (berbuat baik). Pendidikan karakter tidak hanya benar atau salah, tetapi lebih dari itu. Pendidikan karakter mendorong kebiasaan (*habits*) yang baik pada diri siswa sehingga mereka mengerti, tahu bagaimana merasakan dan mau berbuat baik. Hal ini sejalan dengan teori gagne terkait prinsip proses pembelajaran (Devi, Ujang, & Febrian, 2023), diantaranya:

- a. *Attention*, adalah pembelajaran yang membangkitkan minat siswa dengan menghadirkan sesuatu yang baru, aneh, kontradiktif atau kompleks.
- b. Tujuan pembelajaran mengajar (mengkomunikasikan tujuan kepada siswa), yaitu mengajarkan keterampilan yang harus dikuasai siswa setelah akhir pelajaran atau setelah menerima materi yang disampaikan oleh guru.
- c. Mengingat kembali prinsip-prinsip yang dipelajari (stimulasi memori atau pembelajaran sebelumnya), yaitu stimulasi memori informasi yang dipelajari, yang merupakan prasyarat untuk mempelajari materi baru.
- d. Memberikan materi pelajaran (*presenting the stimulus*), yaitu menyampaikan secara garis besar materi-materi pembelajaran yang telah direncanakan.
- e. Memberikan bimbingan belajar (pemberian penunjang belajar), dengan mengarahkan proses berfikir siswa agar lebih memahami kedepannya.

H. kerangka berpikir

Tabel 1.1 Kerangka Berpikir



Kerangka berpikir dalam penelitian ini menggambarkan alur logis dari permasalahan hingga hasil yang diharapkan dalam implementasi pendidikan antikorupsi melalui pembelajaran PPKn.

Pada tahap Input, terdapat sejumlah permasalahan utama yang melatarbelakangi penelitian, seperti rendahnya kesadaran siswa terhadap nilai-nilai antikorupsi, minimnya program yang secara khusus menanamkan nilai integritas, kurangnya keteladanan dari lingkungan sekitar, serta belum eksplisitnya kurikulum dalam memuat nilai antikorupsi.

Tahap Proses mencakup pelaksanaan pendidikan antikorupsi dalam pembelajaran PPKn, antara lain melalui interaksi pendidikan antara guru dan siswa, penggunaan metode pembelajaran aktif dan kontekstual, peran guru sebagai teladan nilai karakter, serta pengintegrasian nilai-nilai antikorupsi dalam materi ajar.

Dari proses tersebut diharapkan menghasilkan Output berupa meningkatnya pemahaman siswa terhadap nilai antikorupsi, tumbuhnya kesadaran kritis terhadap praktik korupsi, serta terbentuknya sikap dan perilaku siswa yang mencerminkan nilai integritas. Selain itu, proses ini juga diharapkan meningkatkan efektivitas pembelajaran PPKn.

Akhirnya, pada tahap Outcome, tujuan jangka panjang dari pendidikan ini adalah terbentuknya generasi muda yang jujur, berintegritas, dan mampu menjadi agen perubahan di masyarakat. Budaya sekolah pun diharapkan mendukung nilai-nilai kejujuran, dan nilai antikorupsi dapat terinternalisasi dalam kehidupan sehari-hari siswa.

I. Penelitian terdahulu

Dalam penelitian ini si penulis mengambil 5 penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang penulis ambil.

1. Penelitian oleh Jihan Humaira, Dinie Anggraeni Dewi, dan Yayang Furi Furmmasari (2021)

Penelitian yang berjudul “Implementasi Pendidikan Anti Korupsi pada Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Siswa di Sekolah Dasar” ini dilakukan oleh mahasiswa Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Pendidikan Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan pendidikan anti korupsi di sekolah dasar serta memberikan pemahaman kepada siswa mengenai apa itu tindakan korupsi dan pentingnya nilai-nilai kejujuran.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif dan bersifat literatur. Populasi dalam penelitian ini adalah guru dan siswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat berbagai faktor yang mendukung pengembangan karakter siswa melalui pendidikan anti korupsi, yang terbagi dalam dua kategori yaitu faktor internal dan eksternal. Penelitian juga menyoroti pentingnya peran guru dalam memberikan pemahaman tentang tindakan korupsi dan menanamkan nilai-nilai kejujuran agar siswa dapat menghindari tindakan korupsi serta bersikap jujur dalam kehidupan sehari-hari. Meski demikian, penelitian menemukan bahwa masih banyak kekurangan pada silabus, indikator, tujuan, media, dan strategi pembelajaran yang memerlukan perbaikan demi memperkuat karakter siswa dalam konteks pendidikan anti korupsi.

Adapun perbedaan antara penelitian yang penelitian rujuk yaitu pada penelitian terdahulu fokus pada pengembangan seperti projeck citizen, penguatan karakter atau program edukasi antikorupsi sedangkan penelitian yang hendak dilakukan yaitu fokus pada implementasi nyata di kelas PPKn termasuk peran guru, pemahaman siswa dan dampak

2. Penelitian oleh Sri Rezki Maulina Azmi (2020)

Penelitian ini berjudul “Implementasi Pendidikan Antikorupsi pada Mata Kuliah PKN Berbasis Project Citizen di STMIK Royal Kisaran”. Penelitian dilakukan oleh Sri Rezki Maulina Azmi dari Program Studi Sistem Informatika, STMIK Royal. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan pendidikan antikorupsi dalam pembelajaran kewarganegaraan melalui kegiatan berbasis proyek warga negara (Project Citizen). Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa. Pengumpulan data dilakukan dengan metode kualitatif melalui dokumentasi, wawancara, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pendidikan antikorupsi dapat berjalan secara aktif melalui pembelajaran berbasis proyek yang mendorong keterlibatan mahasiswa secara langsung dalam kegiatan yang menumbuhkan sikap antikorupsi.

Adapun perbedaan antara penelitian yang penelitian rujuk yaitu pada penelitian terdahulu bersubjek siswa SD, siswa SMA, mahasiswa, guru, kepala sekolah sedangkan penelitian yang akan dilakukan pada subjek guru PPKn, siswa SMK, kepala sekolah, BK.

3. Penelitian oleh Tubagus Lukman Hakim & Reza Pradityayudha (2021)

Judul penelitian ini adalah “Implementasi Pendidikan Antikorupsi pada Mata Pelajaran PPKn Berbasis Project Citizen di SMAN 6 Kabupaten Tangerang Banten”. Penelitian dilakukan oleh Tubagus Lukman Hakim dan Reza Pradityayudha dari Universitas Gunadarma. Populasi dalam penelitian ini mencakup kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru PPKn, dan peserta didik. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi pendidikan antikorupsi melalui kegiatan pembelajaran berbasis proyek warga negara. Teknik analisis data dilakukan dalam tiga tahap yaitu: menggolongkan, mereduksi, dan menghilangkan data yang tidak relevan dengan tujuan penelitian. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan berbasis proyek efektif dalam menginternalisasikan nilai-nilai antikorupsi

kepada peserta didik melalui mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

Adapun perbedaan antara penelitian yang penelitian rujuk yaitu pada penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan sebagian bersifat studi literatur dan program pengabdian masyarakat sedangkan penelitian yang akan dilakukan yaitu dengan metode kualitatif deskriptif berbasis lapangan langsung dengan Teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.

4. Penelitian oleh Yenik Pujowati, Putu Ari Saruhum Hasibuan, dan Sucahyo Tri Budiono (2024)

Judul penelitian ini adalah “Implementasi Pendidikan Antikorupsi melalui Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di Sekolah Menengah Atas di Kota Surabaya”. Penelitian ini dilakukan oleh tim dari Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa. Penelitian ini bertujuan untuk memperkenalkan fenomena korupsi secara menyeluruh mulai dari kriteria, penyebab, hingga akibatnya dan menanamkan nilai-nilai antikorupsi. Pendidikan ini juga diharapkan mampu meningkatkan sikap tidak toleran terhadap korupsi, menunjukkan berbagai upaya melawan korupsi, serta mengembangkan kapasitas generasi muda dalam menolak tindakan korupsi. Kegiatan ini merupakan bagian dari program pengabdian masyarakat yang menyampaikan ide-ide dan kerangka teoritis serta implementatif dari pendidikan antikorupsi dalam pembelajaran PKn. Pengumpulan data dilakukan secara kualitatif.

Adapun perbedaan antara penelitian yang penelitian rujuk yaitu pada penelitian terdahulu yaitu mendeskripsikan penerapan anti korupsi dalam kurikulum, menyosialisasikan nilai anti korupsi sedangkan penelitian yang akan dilakukan yaitu dengan mengetahui pemahaman siswa terhadap nilai-nilai anti korupsi, menjelaskan program pendukung dan menganalisis dampak penerapan nilai anti korupsi di smk.

5. Penelitian oleh Dairani, Fathorrahman, dan Faradilla Mutiara Nisa (2022)

Judul penelitian ini adalah “Implementasi Pendidikan Anti Korupsi Melalui Program Pusat Edukasi Anti Korupsi di Sekolah Dasar”. Penelitian ini berasal dari Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Ibrahimy. Populasi dalam penelitian ini adalah kepala sekolah. Tujuan penelitian ini adalah untuk membahas implementasi program pusat edukasi antikorupsi di tingkat sekolah dasar. Program ini diharapkan mampu menciptakan manusia yang berakhlak baik, berpengetahuan luas, dan memiliki kesadaran diri terhadap buruknya tindakan korupsi. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dan menggambarkan bagaimana program edukasi antikorupsi dijalankan di sekolah dasar serta pengaruhnya terhadap pembentukan karakter siswa sejak dini.

Adapun perbedaan antara penelitian yang penelitian rujuk yaitu pada penelitian terdahulu menekankan pentingnya program dan metode pengajaran tertentu. Sedangkan penelitian ini menekankan pada siswa yang belum memahami nilai antikorupsi secara mendalam, guru berperan penting tapi belum maksimal dalam penerapan nilai anti korupsi, diperlukan integrasi nilai anti korupsi ke dalam pembelajaran yang lebih aktif dan kontekstual.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam suatu penelitian, terutama dalam penelitian yang hendak peneliti lakukan. Sehubungan dengan penelitian ini, peneliti menggunakan langkah-langkah penelitian sebagai berikut.

A. Metode Penelitian

Menurut Creswell (2010), penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Penelitian kualitatif digunakan jika masalah belum jelas, mengetahui makna yang tersembunyi, memahami interaksi sosial, mengembangkan teori, memastikan kebenaran data, dan meneliti sejarah perkembangan. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan dan prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari partisipan, dan menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema umum, dan menafsirkan makna data.

Berdasarkan pendekatan dan jenis data yang digunakan, penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kualitatif sehingga akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata. Data yang dianalisis di dalamnya berbentuk deskriptif dan tidak berupa angka-angka seperti halnya pada penelitian kuantitatif. Menurut (Arikunto, 2014), penelitian kualitatif dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian itu dilakukan. Oleh karena itu, penelitian kualitatif mampu mengungkap fenomena-fenomena pada suatu subjek yang ingin diteliti secara mendalam. Penelitian ini ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individu maupun kelompok.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan deskriptif sebagai bagian dari penelitian kualitatif. Menurut (Sugiyono, 2015) pengertian deskriptif adalah

penelitian yang dilakukan untuk mengetahui keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lainnya. Pendekatan deskriptif digunakan untuk mengungkapkan hasil penelitian lebih lanjut, sesuai dengan pendekatan dan metodologi. Pendekatan deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan dan memaparkan dengan jelas temuan fakta-fakta penelitian. Dalam penelitian ini, pendekatan deskriptif akan digunakan untuk menjelaskan mengenai internalisasi kesadaran hukum dalam penanganan konflik social di SMK PGRI 2 CIMAHI.

B. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan datanya dengan cara penelitian lapangan/survey, sedangkan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung objek penelitian menggunakan pancaindra, terutama penglihatan dan pendengaran, guna memperoleh informasi yang relevan dan mendalam terkait fokus penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan observasi partisipatif non-intervensi, yaitu peneliti hadir langsung di lingkungan sekolah untuk mengamati proses kegiatan pembelajaran dan interaksi antar subjek penelitian, namun tidak terlibat secara langsung dalam aktivitas yang diamati.

Adapun subjek yang diamati dalam proses observasi ini meliputi dua orang guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), dua orang siswa, kepala sekolah atau wakil kepala sekolah bidang kurikulum, serta guru bimbingan dan konseling (BK). Observasi dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui secara nyata bagaimana pelaksanaan pembelajaran, interaksi guru dan siswa, peran pihak sekolah dalam mendukung proses pembelajaran, serta kendala-kendala yang dihadapi di lapangan. Hasil dari observasi ini menjadi salah satu dasar dalam menganalisis data dan menyimpulkan temuan dalam penelitian.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab secara tatap muka antara penanya dengan responden. Metode wawancara atau *interview* adalah suatu metode yang dilakukan dengan jalan mengadakan jalan komunikasi dengan sumber data melalui dialog (tanya jawab) secara lisan baik langsung maupun tidak langsung. (J.Moleong, 2014) mendefinisikan wawancara sebagai percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interview*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Adapun yang di wawancarai yaitu dua orang guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), dua orang siswa, kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang kurikulum, serta guru bimbingan dan konseling (BK).

c. Dokumentasi

Menurut (J.Moleong, 2014) mengemukakan bahwa analisis dokumentasi dapat digunakan karena merupakan sumber yang stabil, kaya dan mendorong serta dokumentasi sifatnya alamiyah sesuai dengan konteks lahiriyah tersebut

Dokumentasi adalah salah satu sumber data yang penting dalam penelitian ini untuk mendukung keakuratan data dan proses penelitian. Selain itu, file dokumentasi akan menjadi bukti keabsahan telah dilakukannya sebuah penelitian. Dokumentasi dalam hal ini Adapun foto atau video yang didapatkan selama proses penelitian, baik itu dokumentasi pribadi, publik maupun dokumentasi informan.

C. Teknik Penentuan Informan

Moleong menjelaskan bahwa informan merupakan seseorang yang diharapkan bisa memberi informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian sehingga ia harus memiliki banyak pengetahuan mengenai latar penelitian (J.Moleong, 2014). Informan dalam penelitian ini terdapat informan yang akan

memeberikan informasi berjumlah enam orang yang terdiri dari Kepala Sekolah atau Wakil Kepala Sekolah, satu Guru PPKn, Guru BK Dan dua orang Siswa

a. Validasi Data

Validasi data diterapkan dalam rangka membuktikan kebenaran temuan hasil penelitian dengan kenyataan di lapangan. Lincoln dan Guba dalam bukunya (J.Moleong, 2014) untuk memeriksa keabsahan data pada penelitian kualitatif maka digunakan taraf kepercayaan data dengan teknik triangulasi. Teknik triangulasi yang digunakan adalah teknik pemeriksaan dengan memanfaatkan penggunaan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda.

Teknik pemeriksaan data ini memanfaatkan sesuatu yang lain untuk keperluan pengecekan atau membandingkan triangulasi dengan sumber data yang dapat ditempuh dengan jalan sebagai berikut:

1. Membandingkan data hasil pengamatan atau observasi dengan data hasil wawancara. Dari hasil observasi tersebut peneliti membandingkan apakah sesuai dengan data hasil wawancara. Hasil dari perbandingan 69 data observasi menunjukkan adanya kesesuaian dengan data hasil wawancara dengan sejumlah informan.
2. Membandingkan data yang diperoleh dari informan utama dalam penelitian dengan data yang diperoleh dari informan yang lain.
3. Membandingkan hasil wawancara dengan informan, peneliti membandingkan data hasil wawancara tersebut dengan dokumen yang peneliti peroleh. Teknik pemeriksaan data ini memanfaatkan sesuatu yang lain untuk keperluan pengecekan atau membandingkan triangulasi dengan sumber data.

b. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan kelanjutan dari pengolahan data. Membahas hasil analisis data yaitu berpikir tentang kaitan antara data dan mungkin dengan latar belakang yang menyebabkan adanya persamaan atau perbedaan yang kemudian menghasilkan kesimpulan. Analisis bertujuan dalam membuat

penyelesaian dan memberi jawaban-jawaban dari setiap rumusan masalah yang sudah dibuat, serta memberikan kesimpulan dan saran untuk penelitian selanjutnya.

Miles dan Huberman dalam (J.Moleong, 2014) menyatakan dalam analisis kualitatif dapat dilaksanakan dengan cara terus menerus (interaktif) sampai tuntas sampai menjadi data jenuh. Teknik dalam melaksanakan analisis data, yaitu:

a. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Data didapatkan dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi data-data atau catatan yang terdapat di lapangan yaitu deskriptif dan refleksi. Catatan deskriptif merupakan catatan alami, catatan mengenai sesuatu yang di dengar, disaksikan, dilihat dan yang peneliti alami tanpa ada asumsi atau tafsiran yang bersumber dari peneliti perihal suatu fenomena yang telah dialami. Catatan refleksi merupakan catatan yang isinya mengenai kesan, komentar, serta pendapat mengenai suatu temuan yang ditemukan, dan perencanaan pengumpulan data pada tahap selanjutnya

b. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data dilakukan dengan mencari tema dan polanya, memilah hal-hal yang dirasa penting, merangkum, serta membuang halhal yang dirasa tidak diperlukan. Reduksi data nantinya akan menghasilkan gambaran dan langkah yang jelas dalam melaksanakan pengumpulan data selanjutnya. Dalam penelitian ini nantinya akan dibuat ringkasan awal hasil dari observasi dan juga wawancara yang dilakukan kepada beberapa informan yang sudah ditentukan serta akan memfilter beberapa temuan pada penelitian yang berlangsung di lapangan

c. Penyajian Data (*Data Display*)

Dalam penyajian data bisa bentuk tulisan atau kata-kata, gambar, grafik, dan tabel. Tujuan dari penyajian data ialah untuk menggabungkan informasi sehingga bisa menggambarkan keadaan yang terjadi. Peneliti tidak kesusahan dalam menguasai informasi baik dengan semua atau tugas-tugas tertentu dari hasil penelitian, untuk itu peneliti membuat suatu naratif, matrik atau grafik guna memudahkan dalam menguasai informasi data tersebut. Dengan demikian

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan yang disertai dengan observasi dan wawancara kepada enam orang yang terdiri dari satu guru PPKn, dua orang siswa, Kepala Sekolah atau Wakil Kepala Sekolah, Dan guru bimbingan konseling, Maka dapat diperoleh informasi khususnya mengenai Implementasi Pendidikan Anti Korupsi Dalam Pembelajaran Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Di SMK PGRI 2 Cimahi. Hasil penelitian dan pembahasan tersebut akan diuraikan dalam tiga sub bagian yaitu, Deskripsi Tempat Penelitian, Deskripsi Hasil Penelitian, dan Hasil Pembahasan yang terdiri dari. 1) Pemahaman siswa mengenai nilai-nilai anti korupsi di SMK PGRI 2 Cimahi, 2) Program pendukung penanaman nilai anti korupsi pada siswa SMK PGRI 2 Cimahi, 3) Dampak penanaman nilai anti korupsi di SMK PGRI 2 Cimahi

A. Deskripsi Tempat Penelitian

1. Gambaran Umum SMK PGRI 2 Cimahi

Deskripsi umum SMK PGRI 2 Cimahi yang akan peneliti uraikan adalah berdasarkan temuan dari dokumen-dokumen yang peneliti dapatkan dari pihak sekolah. Deskripsi umum ini terdiri dari letak sekolah, sejarah pendirian, visi dan misi sekolah, program keahlian sekolah, data sarana dan prasarana.

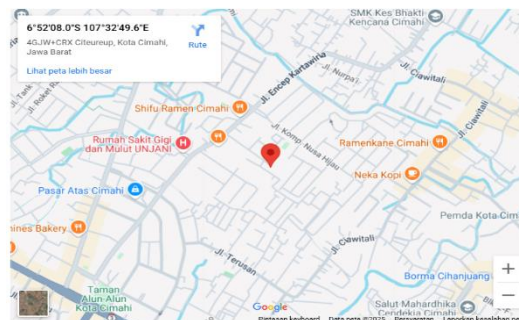
Sekolah yang diteliti bernama Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) PGRI 2 Cimahi, sebuah sekolah swasta yang berdiri sejak tahun 1960, merupakan pilihan tepat bagi para siswa yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang Sekolah Menengah Kejuruan. Terletak di Jl. Encep Kartawira No. 153, Cimahi Utara, Kota Cimahi, sekolah ini memiliki akses mudah dan strategis.

Berbekal pengalaman panjang dan dedikasi tinggi, SMK PGRI 2 Cimahi telah mendapatkan akreditasi A berdasarkan SK No. 1214/BAN-SM/SK/2018 yang diterbitkan pada 31 Desember 2018. Hal ini

membuktikan kualitas pendidikan yang tinggi dan komitmen sekolah dalam memberikan layanan pendidikan terbaik bagi para siswanya.

Sebagai sekolah swasta di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, SMK PGRI 2 Cimahi menjalankan proses belajar mengajar secara penuh dengan sistem sehari penuh dan 5 hari dalam seminggu. Sekolah ini juga dilengkapi dengan fasilitas internet melalui jaringan serat optik, sumber listrik dari PLN, dan akses komunikasi melalui email smkpgri2.cimahi@gmail.com dan website <http://smkpgri2cimahi.sch.id>.

Dengan komitmen untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan dan mencetak lulusan yang siap menghadapi tantangan dunia kerja, SMK PGRI 2 Cimahi menjadi pilihan yang tepat bagi para calon siswa yang ingin mengembangkan potensi diri dan meraih masa depan yang cerah.



Gambar 4. 1 Denah SMK PGRI 2 Cimahi

a. Visi:

Menjadikan SMK PGRI 2 Cimahi sebagai sekolah yang unggul dalam menghasilkan lulusan yang profesional, berakhlak mulia, dan mampu bersaing di dunia kerja.

b. Misi:

1. Menciptakan manajemen sekolah yang profesional.
2. Meningkatkan kualitas guru sesuai dengan bidang keahliannya.
3. Mengembangkan dan memanfaatkan sarana serta prasarana pendidikan secara optimal.

4. Mewujudkan sekolah kejuruan yang akuntabel, kompeten, dan berstandar nasional.
5. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan melalui pembelajaran digital.
6. Menerapkan teknologi digital dalam pengelolaan riset dan inovasi melalui lembaga manajemen inovasi.

Gambar 4 2 SMK PGRI 2 Cimahi



2. Program keahlian SMK PGRI 2 Cimahi
SMK PGRI 2 Cimahi menawarkan empat program keahlian, yaitu:
 1. **Farmasi Klinis dan Komunitas (FKK):** Mempersiapkan siswa menjadi asisten apoteker yang kompeten dan mandiri melalui pengembangan kepribadian dan ilmu pengetahuan serta teknologi.
 2. **Akuntansi dan Keuangan Lembaga (AKL):** Membekali siswa dengan kemampuan mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk pengambilan keputusan yang tepat dalam dunia usaha.
 3. **Otomatisasi Tata Kelola Perkantoran (OTKP):** Menghasilkan lulusan yang profesional sebagai typist, resepsionis, arsiparis, dan staf administrasi yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia.
 4. **Bisnis Daring dan Pemasaran (BDP):** Menyiapkan tenaga kerja yang profesional dan mandiri dalam bidang bisnis daring serta mampu mengembangkan sikap kewirausahaan.
3. Fasilitas SMK PGRI 2 Cimahi

SMK PGRI 2 Cimahi dilengkapi dengan berbagai fasilitas penunjang kegiatan belajar mengajar, antara lain:

1. 36 ruang kelas
 2. Laboratorium Biologi
 3. Laboratorium Kimia
 4. Laboratorium Bahasa
 5. 3 Laboratorium Komputer
 6. Perpustakaan
 7. Sanitasi untuk guru dan siswa
4. Kegiatan Ekstrakurikuler SMK PGRI 2 Cimahi

Sekolah SMK PGRI 2 Cimahi menyediakan berbagai kegiatan ekstrakurikuler untuk mengembangkan minat dan bakat siswa, seperti:

1. Pramuka
2. Paskibra
3. OSIS
4. Kegiatan keagamaan
5. Kesenian dan olahraga

B. Deskripsi Hasil Penelitian

Pada tahap ini penelitian diarahkan pada peneliti sebagai instrumen penelitian untuk lebih memahami kenyataan dan kondisi peserta didik dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Hal ini peneliti lakukan dengan mengidentifikasi dan menganalisis kondisi sekolah dan pembelajaran PPKn di SMK PGRI 2 CIMAHI. Melalui wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh gambaran implementasi Pendidikan anti korupsi sebagai Pendidikan karakter di SMK PGRI 2 CIMAHI.

Pemaparan deskripsi hasil penelitian ini merupakan penyatuan dari sumber bukti yang merupakan bagian-bagian dari pengumpulan data studi kasus, yaitu hasil observasi, studi dokumentasi dan wawancara selama berlangsungnya kegiatan penelitian. Kemudian, temuan-temuan tersebut akan peneliti sajikan secara rinci pada bagian paparan temuan atau hasil penelitian.

Pemaparan deskripsi hasil penelitian ini merupakan penyatuan dari sumber bukti yang merupakan bagian-bagian dari pengumpulan data studi kasus, yaitu hasil observasi, studi dokumentasi dan wawancara selama berlangsungnya kegiatan penelitian. Dengan teknik deskriptif kualitatif.

Proses wawancara dilakukan kepada 7 narasumber yang berada di SMK PGRI 2 CIMAHI. Data yang diperoleh dari hasil wawancara serta observasi tergambar pada penelitian berikut :

- 1) Wakil kepala sekolah SMK PGRI 2 CIMAHI
 - a. R1 WK (Wakil kepala sekolah SMK PGRI 2 Cimahi) pada 12 Juni 2025
- 2) Guru PPKn SMK PGRI 2 CIMAHI
 - a. R2 GP (Guru Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan SMK PGRI 2 Cimahi) pada 12 Juni 2025
- 3) Guru bidang konseling SMK PGRI 2 CIMAHI
 - a. R3 GB (Guru Bimbingan Konseling SMK PGRI 2 Cimahi) pada 12 Juni 2025
- 4) Peserta didik SMK PGRI 2 CIMAHI
 - a. R4 AP2 pada 4 Juni 2025
 - b. R5 AP2 pada 4 Juni 2025

Untuk melengkapi data, maka peneliti melakukan observasi langsung secara partisipatif dan non-partisipatif, yang dilakukan dari April 2025 sampai dengan Mei 2025. Observasi ini dilaksanakan terhadap situasi pembelajaran dan kondisi lingkungan disekitar SMK PGRI 2 CIMAHI.

Hasil wawancara dan observasi, dapat peneliti deskripsikan sebagai berikut:

1. Pemahaman siswa mengenai nilai-nilai anti korupsi di SMK PGRI 2 Cimahi

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi tentang pemahaman siswa mengenai nilai-nilai anti korupsi di SMK PGRI 2 Cimahi. Penelitian ini mengamati pemahaman kopeptual siswa tentang korupsi, pembelajaran nilai-nilai anti korupsi dalam PPKn, sikap dan tindakan siswa terhadap nilai anti korupsi, budaya sekolah dalam mendukung

nilai anti korupsi. Berdasarkan narasumber yang sudah di waancarai oleh peneliti mengungkapkann bahwa pemahaman siswa mengenai nilai-nilai anti korupsi menurut R1 KS, R2 GP, R3 GP, R4 GB, R4 S, R5 S dalam pemahaman siswa mengenai nilai-nilai anti korupsi sangat penting dimiliki oleh siswa.

Menurut hasil observasi siswa menunjukkan antusias yang tinggi selama pembelajaran berlangsung hal ini terlihat dari keterlibatan mereka dalam diskusi kelas, respon cepat terhadap pertanyaan guru, serta inisiatif siswa untuk mengajukan pertanyaan yang menunjukkan rasa ini tahu terhadap materi yang dibahas. Banyak siswa yang berpartisipasi secara aktif, tidak hanya mendengarkan tetapi menyampaikan pendapat, argumen, dan pertanyaan yang kritis terutama dalam konteks nilai-nilai anti korupsi.

Di perkuat berdasarkan hasil wawancara yang sudah peneliti lakukan dengan Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMK PGRI 2 Cimahi dengan menggunakan teknik wawancara dan observasi untuk dapat memperoleh data mengenai pelaksanaan pemahaman siswa mengenai nilai-nilai anti korupsi. Menurut informan R2 GP menjelaskan bahwa:

Nilai-nilai antikorupsi sudah ada didalam kurikulum PPKn di SMK PGRI 2 Cimahi adapun cara dengan cara melakukan beberapa cara baik dalam Pendidikan, kehidupan sehari-hari, atau dalam konteks sosial dan politik. Siswa cenderung merespon positif dalam pembelajaran khususnya ketika pendekatan pembelajaran yang digunakan relevan dalam kehidupan sehari-hari.

Adapun pemahaman siswa mengenai nilai-nilai antikorupsi menurut informan R4 S menjelaskan bahwa:

belajar nilai antikorupsi di PPKn sangat penting karena mengajarkan kejujuran, tanggung jawab, dan integritas. Biasanya lewat diskusi, nonton video, atau buat poster tentang bahaya korupsi. Itu membantu kita sadar pentingnya jujur sejak dini.

Menurut nilai-nilai seperti kejujuran dan tanggung jawab cukup sering diterapkan di lingkungan sekolah, misalnya saat ujian harus jujur, mengerjakan tugas tepat waktu, dan menjaga kebersihan kelas.

Guru menyampaikan nilai-nilai antikorupsi lewat cerita, diskusi, contoh kasus nyata, dan kegiatan seperti debat atau membuat poster. Dengan cara itu, siswa lebih mudah memahami dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Adapun pemahaman siswa mengenai nilai-nilai antikorupsi menurut informan R5 S menjelaskan bahwa:

Dalam pembelajaran PPKn, saya mulai memahami pentingnya nilai-nilai antikorupsi melalui berbagai metode yang menarik dan bermakna. Guru saya menyampaikan materi dengan cara yang menyenangkan, seperti melalui cerita inspiratif dan diskusi kelompok. Cerita-cerita yang disampaikan menggambarkan situasi nyata tentang kejujuran, tanggung jawab, dan integritas, sehingga kami lebih mudah memahami dan meresapi maknanya.

Selain itu, kami juga diajak aktif terlibat dalam pembelajaran dengan membuat poster kampanye antikorupsi. Tugas ini tidak hanya mengasah kreativitas kami, tetapi juga memperkuat pemahaman tentang bagaimana korupsi dapat dicegah sejak usia dini. Melalui kegiatan ini, saya menyadari bahwa melawan korupsi bukan hanya tanggung jawab orang dewasa atau pemerintah, tetapi juga menjadi bagian dari karakter yang harus ditanamkan sejak masa sekolah. Pembelajaran ini membuat saya lebih sadar akan pentingnya bersikap jujur dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari.

2. Program pendukung penanaman karakter anti korupsi pada siswa SMK PGRI 2 Cimahi

Program pendukung penanaman nilai-nilai antikorupsi di SMK PGRI 2 Cimahi berdasarkan observasi belum adanya program khusus untuk Pendidikan antikorupsi yang dilalukan dan diintegrasikan dengan

adanya kegiatan pembiasaan lainnya. Namun guru mencerminkan sikap sebagai teladan dalam pembelajaran baik dari segi sikap maupun tutur kata selama proses mengajar guru menunjukkan konsistensi antara apa yang di ajarkan dengan perilaku sehari-hari dikelas. Misalnya guru mencontohkan sikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab dalam berbagai situasi.

Dan hasil obsevasi tersebut di perkuat dengan hasil wawancara R1 WK dan R2 GP menjelaskan bahwa:

Di SMK PGRI 2 Cimahi, tidak terdapat program khusus yang secara langsung difokuskan pada pendidikan antikorupsi. Namun demikian, nilai-nilai antikorupsi tetap ditanamkan melalui pendekatan terintegrasi dalam berbagai aspek kegiatan sekolah. Pendidikan antikorupsi dilaksanakan secara menyeluruh dengan menggabungkannya ke dalam mata pelajaran yang relevan, termasuk dalam pelajaran PPKn.

Selain itu, penanaman nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin juga dilakukan melalui kegiatan pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah. Suasana sekolah secara umum turut mendukung terbentuknya karakter antikorupsi melalui keteladanan guru dan tata tertib yang konsisten. Di luar kegiatan intrakurikuler, penanaman nilai antikorupsi juga dikembangkan melalui berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang mendorong siswa untuk bersikap jujur, adil, dan bertanggung jawab.

Dengan pendekatan ini, meskipun tidak memiliki program yang berdiri sendiri, SMK PGRI 2 Cimahi tetap berupaya menumbuhkan budaya antikorupsi melalui pembelajaran yang menyatu dalam kehidupan sekolah secara menyeluruh.

Berdasarkan obsevasi Guru PPKn menyampaikan bahwa pendidikan antikorupsi diintegrasikan ke dalam materi pembelajaran secara tematik. Guru menggunakan metode yang variatif seperti diskusi kelompok, studi kasus, pemutaran video edukatif, serta pembuatan poster kampanye. Pendekatan ini terbukti mampu meningkatkan

kesadaran dan pemahaman siswa terhadap pentingnya integritas dan kejujuran selain itu, guru juga menjadi teladan dengan menunjukkan sikap jujur dan disiplin dalam proses mengajar, menciptakan pembelajaran yang tidak hanya bersifat teoritis tetapi juga aplikatif. Dengan demikian, kegiatan belajar mengajar menjadi bagian penting dari strategi internalisasi nilai antikorupsi. Menurut informan R4 S dan R5 S menjelaskan bahwa:

Pembelajaran nilai-nilai antikorupsi di SMK PGRI 2 Cimahi menjadi bagian penting dalam pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Melalui mata pelajaran ini, siswa diajak memahami dan mengamalkan nilai-nilai dasar seperti kejujuran, tanggung jawab, dan integritas. Proses pembelajaran dilakukan dengan beragam metode menarik, seperti diskusi kelompok, pemutaran video edukatif, serta pembuatan poster kampanye antikorupsi. Pendekatan ini membuat siswa lebih aktif dan memahami secara nyata dampak negatif dari tindakan korupsi serta pentingnya sikap jujur dalam kehidupan sehari-hari.

Guru juga menggunakan cerita-cerita inspiratif untuk menggambarkan bagaimana nilai-nilai tersebut diterapkan dalam kehidupan nyata, sehingga siswa tidak hanya memahami secara teori, tetapi juga mampu menginternalisasikannya. Tugas membuat poster antikorupsi, misalnya, memberikan kesempatan bagi siswa untuk menuangkan ide mereka dalam bentuk kreatif, sekaligus meningkatkan kesadaran akan pentingnya melawan korupsi sejak usia sekolah.

Berdasarkan hasil observasi, lingkungan sekolah menunjukkan adanya komitmen yang kuat terhadap pembentukan karakter antikorupsi. Hal ini tercermin dari suasana sekolah yang mendukung penanaman nilai-nilai moral, interaksi yang mencerminkan sikap saling menghargai, serta kebiasaan positif yang dikembangkan di kalangan siswa dan guru. Dengan pendekatan ini, sekolah berperan aktif dalam

membentuk generasi muda yang memiliki kesadaran dan komitmen terhadap integritas dan kejujuran.

3. Dampak penanaman nilai antikorupsi di SMK PGRI 2 Cimahi

Berdasarkan hasil observasi lingkungan sekolah menunjukkan komitmen terhadap pembentukan karakter antikorupsi dengan menciptakan kondusif dan mendidik. Hal ini terlihat dari tidak adanya budaya menyontek di kalangan siswa yang menjadi indikator kuat bahwa nilai kejujuran telah tertanam dalam keseharian mereka.

Hasil temuan peneliti tentang dampak penanaman antikorupsi di SMK PGRI 2 Cimahi menurut hasil wawancara R4 dan R5 menjelaskan bahwa:

Salah satu siswa (R4) menyampaikan bahwa jika ia menyaksikan atau mengetahui adanya tindakan korupsi, ia tidak akan tinggal diam. Ia merasa memiliki tanggung jawab moral dan sebagai warga negara yang baik untuk melaporkan tindakan tersebut kepada pihak yang berwenang, seperti guru, kepala sekolah, atau lembaga terkait. Menurutnya, membiarkan perbuatan korupsi sama dengan membiarkan kejahatan terus berlangsung, sementara melaporkannya adalah bentuk keberanian dan tanggung jawab yang mencerminkan kepedulian terhadap nilai-nilai keadilan.

Tidak hanya itu, siswa tersebut juga mengungkapkan bahwa ia akan menolak secara tegas jika diajak melakukan tindakan korupsi, seperti manipulasi nilai atau penyalahgunaan fasilitas sekolah. Ia akan menjelaskan kepada pelaku bahwa tindakan tersebut salah dan sangat merugikan banyak pihak. Ia percaya bahwa nilai kejujuran dan tanggung jawab jauh lebih penting dibandingkan keuntungan sesaat yang bisa diperoleh dari perbuatan yang tidak jujur. Apabila situasi mendesak, ia tidak ragu untuk melaporkan tindakan tersebut agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar di kemudian hari.

Sementara itu, siswa lain (R5) menuturkan bahwa di sekolah mereka telah diajarkan untuk selalu bersikap jujur, termasuk dalam hal-hal kecil

seperti mengembalikan barang yang bukan milik sendiri. Guru dan staf sekolah menurutnya telah memberikan contoh konkret dalam menerapkan nilai-nilai kejujuran dan tanggung jawab sehari-hari. Ia pun menegaskan bahwa jika menemui tindakan yang menyimpang, khususnya yang mengarah pada praktik koruptif di lingkungan sekolah, ia akan segera melaporkannya kepada guru atau pihak sekolah yang berwenang.

Pernyataan kedua siswa tersebut menggambarkan bahwa pendidikan antikorupsi di sekolah telah membentuk sikap dan kesadaran kritis dalam diri peserta didik. Mereka tidak hanya memahami pentingnya nilai kejujuran dan tanggung jawab, tetapi juga siap untuk bertindak apabila menghadapi situasi yang bertentangan dengan nilai-nilai tersebut.

Program pendukung penanaman nilai anti korupsi Penanaman nilai-nilai antikorupsi di SMK PGRI 2 Cimahi tidak hanya dilakukan melalui kegiatan pembelajaran di kelas, tetapi juga diperkuat melalui berbagai program dan kebijakan sekolah yang bersifat mendukung pembentukan karakter siswa. Berikut merupakan temuan dari hasil wawancara dan observasi lapangan mengenai program-program pendukung tersebut.

a. Integrasi Nilai Antikorupsi dalam Pembelajaran PPKn

Guru PPKn menyampaikan bahwa pendidikan antikorupsi diintegrasikan ke dalam materi pembelajaran secara tematik. Guru menggunakan metode yang variatif seperti diskusi kelompok, studi kasus, pemutaran video edukatif, serta pembuatan poster kampanye. Pendekatan ini terbukti mampu meningkatkan kesadaran dan pemahaman siswa terhadap pentingnya integritas dan kejujuran selain itu, guru juga menjadi teladan dengan menunjukkan sikap jujur dan disiplin dalam proses mengajar, menciptakan pembelajaran yang tidak hanya bersifat teoritis tetapi juga aplikatif. Dengan demikian, kegiatan

belajar mengajar menjadi bagian penting dari strategi internalisasi nilai antikorupsi.

b. Peran Guru BK dalam Pembinaan Karakter

Guru Bimbingan dan Konseling (BK) turut berperan aktif dalam pembinaan karakter siswa, khususnya dalam aspek kejujuran dan tanggung jawab. Dalam wawancara, guru BK menyampaikan bahwa pelanggaran terkait integritas seperti mencontek atau manipulasi data sering kali menjadi fokus pembinaan. Guru BK juga mengadakan konseling untuk membentuk kesadaran pribadi siswa akan pentingnya nilai kejujuran dalam kehidupan sekolah dan bermasyarakat.

c. Kebijakan dan Dukungan dari pihak sekolah

Wawancara dengan kepala sekolah dan wakil kepala sekolah mengungkapkan bahwa sekolah memiliki kebijakan yang mendukung program penanaman nilai-nilai antikorupsi, seperti:

1. **Pembiasaan kedisiplinan dan kejujuran sejak siswa datang ke sekolah**, seperti kehadiran tepat waktu dan pelaporan yang jujur atas keterlambatan atau pelanggaran.
2. **Adanya pembinaan karakter** untuk siswa yang melanggar tata tertib sebagai bentuk penguatan nilai tanggung jawab dan koreksi diri.
3. **Monitoring dan evaluasi oleh guru dan wali kelas** secara berkala terhadap perilaku siswa, termasuk kejujuran akademik dan sosial. Program-program ini dilaksanakan tidak hanya sebagai bentuk penegakan aturan, tetapi juga sebagai pembelajaran moral yang berkesinambungan.

d. Lingkungan sekolah sebagai media edukasi nilai anti korupsi

Observasi menunjukkan bahwa lingkungan sekolah dirancang untuk mendukung pembelajaran nilai-nilai karakter, termasuk antikorupsi. Beberapa indikatornya adalah:

1. **Poster dan slogan bertema antikorupsi** yang dipasang di dinding kelas, koridor, dan area umum sekolah. Pesan-pesan moral ini menyampaikan ajakan untuk bersikap jujur, menolak kecurangan, dan menjadi warga yang bertanggung jawab.
 2. **Tidak adanya budaya menyontek** atau tindakan curang yang dibiarkan. Guru mengawasi dengan ketat proses evaluasi dan ujian, serta menekankan pentingnya kejujuran akademik.
 3. **Kegiatan ekstrakurikuler dan lomba bertema antikorupsi**, seperti pembuatan poster, kampanye kelas, dan diskusi terbuka tentang bahaya korupsi, yang memberikan ruang kepada siswa untuk mengekspresikan dan memperkuat nilai-nilai tersebut.
- e. Keterlibatan siswa dalam program anti korupsi

Siswa menunjukkan antusiasme yang tinggi dalam mengikuti kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan antikorupsi. Melalui wawancara, siswa menyatakan bahwa mereka merasa nilai-nilai seperti kejujuran dan tanggung jawab telah menjadi bagian dari kehidupan sekolah. Partisipasi siswa dalam pembuatan poster, diskusi kelas, serta keberanian untuk menyampaikan pendapat dalam isu moral menjadi bukti nyata bahwa program-program tersebut berhasil menciptakan lingkungan yang mendukung penguatan karakter.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Pembahasan ini merupakan pembahasan atas penelitian yang ada dilapangan, penanaman nilai-nilai anti korupsi sebagai Pendidikan karakter,

faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi pendidik dalam menerapkan penanaman nilai-nilai anti korupsi sebagai Pendidikan karakter, strategi dan metode guru PPKn dalam mengembangkan karakter peserta didik melalui penanaman nilai-nilai antikorupsi.

1. Pemahaman siswa mengenai nilai-nilai antikorupsi di SMK PGRI 2 Cimahi

Pemahaman siswa mengenai nilai-nilai antikorupsi di SMK PGRI 2 Cimahi dapat dikatakan memiliki pemahaman yang baik terhadap nilai-nilai antikorupsi. Pembelajaran nilai-nilai anti korupsi dalam PPKn, sikap dan tindakan siswa terhadap nilai antikorupsi, budaya sekolah dalam mendukung nilai antikorupsi. Hal ini terlihat dari siswa yang aktif dalam proses pembelajaran PPKn, khususnya saat materi yang berkaitan dengan nilai-nilai antikorupsi. Siswa menunjukkan antusias tinggi saat pembelajaran berlangsung, ditunjukkan dengan respon cepat terhadap pertanyaan guru, partisipasi aktif dalam diskusi kelas, serta inisiatif mereka dalam mengajukan pertanyaan kritis. (KPK, 2017) menekankan bahwa pendidikan antikorupsi harus diintegrasikan sistematis ke dalam pembelajaran PPKn. Hal ini jelas tercermin di SMK PGRI 2 Cimahi melalui berbagai aktivitas seperti tugas kelompok, studi kasus sosial, dan refleksi nilai yang dilakukan secara rutin dalam kelas PPKn.

Hal ini mencerminkan bahwa siswa tidak hanya memahami konsep antikorupsi secara teori, tetapi juga memiliki ketertarikan untuk mendalami isu tersebut secara lebih mendalam. Hal ini sejalan dengan teori Pendidikan kritis (Freire, 1970) yang menyatakan bahwa pendidikan harus membebaskan peserta didik dari ketidaksadaran social. Dengan menggali kasus nyata dan menganalisisnya, siswa dilatih untuk memahami realitas social secara kritis dan membangun sikap menolak korupsi secara sadar dan bertanggung jawab. Bahwa Pendidikan merupakan “usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan

sepiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat” (Undang-Undang, 2003). (Hamilton-Hart, 2001) Pendidikan anti korupsi adalah salah satu upaya yang dilakukan oleh otoritas publik dalam menanamkan musuh watak kehinaan pada siswa di lingkungan sekolah. Penghinaan itu sendiri bukanlah demonstrasi yang merugikan banyak individu dengan memanfaatkan posisi untuk penambahan individu. Kekotoran batin yang dilakukan dengan cara-cara yang tidak sesuai standar, misalnya membayar, pemerasan dan pemerasan dapat terjadi di wilayah otoritas publik yang akan berubah menjadi infeksi yang memusnahkan seluruh bagian kehidupan. Anti korupsi dilihat dalam konteks Pendidikan adalah tindakan untuk mengendalikan atau mengurangi korupsi, merupakan keseluruhan upaya untuk mendorong generasi-generasi mendatang mengembangkan sikap menolak secara tegas setiap bentuk tindak korupsi (Buchori, Muchtar, 2007).

Pendidikan formal mengupayakan pemberantasan tindakan korupsi dapat dilakukan dengan upaya preventif yang ditanamkan sejak dini bagi peserta didik sebagai generasi penerus melalui penetrasi nilai-nilai anti korupsi, nilai-nilai kejujuran beserta contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini penting bagi masyarakat agar memiliki pemahaman dasar mengenai pengertian korupsi beserta bentuk- bentuk korupsi itu sendiri. (Monalisa, Rince, & Hotmaid, 2024)

Pelatihan permusuhan terhadap kemerosotan dapat diartikan sebagai program instruktif yang menjelaskan dan mengalahkan kekotoran batin yang berbeda yang terjadi secara lokal dengan menanamkan musuh jiwa kemerosotan pada waktu yang tepat dengan niat penuh untuk membangun dan memperluas keakraban penduduk dengan risiko dan hasil demonstrasi. dari kekotoran. Sekolah bermusuhan dengan kemerosotan memiliki tiga tujuan, pertama, untuk membentuk informasi dan pemahaman tentang jenis-jenis kekotoran batin dan

perspektifnya. Kedua, mengubah penegasan dan perspektif menuju kemerosotan. Ketiga, membingkai kemampuan dan kemampuan baru yang ditujukan untuk memerangi kemerosotan (Hakim, 2012).

Hasil wawancara dengan informan R2 (guru PPKn) menjelaskan bahwa nilai-nilai antikorupsi telah terintegrasi dalam kurikulum PPKn, dan diajarkan melalui pendekatan kontekstual yang relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Siswa merespons materi dengan positif, terlebih ketika metode pengajaran yang digunakan interaktif seperti diskusi, studi kasus, dan pembuatan media visual seperti poster. Pendekatan ini sesuai dengan teori Gagne dalam jurnal (Devi, Ujang, & Febrian, 2023) khususnya dalam aspek membangkitkan perhatian, merangsang ingatan, memberikan stimulus dan memberikan bimbingan yang membantu siswa membangun makna atas materi antikorupsi yang dipelajari.

Lebih lanjut, berdasarkan wawancara dengan siswa (R4 dan R5), mereka menyatakan bahwa nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan integritas telah diterapkan dalam keseharian mereka di sekolah. Para guru tidak hanya mengajarkan secara verbal, namun juga melalui keteladanan dalam sikap dan tindakan. Dengan demikian, pemahaman siswa mengenai nilai-nilai antikorupsi tidak hanya berada pada tingkat kognitif, tetapi juga telah sampai pada tataran afektif dan psikomotorik, yang tercermin dalam perilaku mereka sehari-hari. Penanaman nilai dilakukan tidak hanya melalui pengajaran langsung, tetapi juga melalui keteladanan guru sesuai dengan teori belajar sosial (Bandura, 1977). Siswa mengamati dan meniru sikap antikorupsi guru seperti kejujuran, kedisiplinan dan tanggung jawab, yang kemudian mereka aplikasikan dalam kehidupan sekolah sehari-hari. Ini memperkuat proses internalisasi nilai melalui pengamatan dan pengalaman langsung. Antikorupsi adalah segala bentuk tindakan, sikap, dan kebijakan yang bertujuan untuk mencegah, menolak, dan memberantas praktik korupsi. Tindakan antikorupsi mencakup

pendidikan, penegakan hukum, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan. proses belajar mengajar adalah bagian terpenting guna membangun kualitas sebuah negara. Semakin meningkat kualitas pendidikan maka semakin maju pula bangsa itu. (Hakim, 2012) menyebutkan tiga tujuan utama pendidikan antikorupsi, yakni membentuk pengetahuan, membangun sikap, dan membentuk keterampilan menolak korupsi. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa siswa tidak hanya tahu apa itu korupsi (pengetahuan), tetapi juga memiliki sikap menolak praktik tersebut dan menunjukkan perilaku seperti menghindari menyontek dan bersikap jujur dalam tugas kelompok. Secara harfiah arti pendidikan adalah mendidik yang dilaksanakan oleh seorang pengajar kepada peserta didik, diharapkan orang dewasa pada anak-anak untuk bisa memberikan contoh tauladan, pembelajaran, pengarahan, dan peningkatan etika akhlak, serta menggali pengetahuan setiap individu. Pengajaran yang diberikan pada peserta didik bukan saja dari pendidikan formal yang dilaksanakan oleh pemegang kekuasaan, namun dalam hal ini fungsi keluarga serta masyarakatlah yang amat penting dan menjadi wadah pembinaan yang bisa membangkitkan serta mengembangkan pengetahuan serta pemahaman (Ab & Firman, 2019)

Dalam “Undang-undang nomor 20 Tahun 2003” tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 3 tujuan Pendidikan nasional adalah “mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri serta menjadi warga negara yang demokratis juga bertanggung jawab” (Undang- Undang, 2023). Hal ini sejalan dengan teori gagne terkait prinsip proses pembelajaran dalam jurnal (Devi, Ujang, & Febrian, 2023), diantaranya:

1. *Attention*, adalah pembelajaran yang membangkitkan minat siswa dengan menghadirkan sesuatu yang baru, aneh, kontradiktif atau kompleks.

2. Tujuan pembelajaran mengajar (mengkomunikasikan tujuan kepada siswa), yaitu mengajarkan keterampilan yang harus dikuasai siswa setelah akhir pelajaran atau setelah menerima materi yang disampaikan oleh guru.
 3. Mengingat kembali prinsip-prinsip yang dipelajari (stimulasi memori atau pembelajaran sebelumnya), yaitu stimulasi memori informasi yang dipelajari, yang merupakan prasyarat untuk mempelajari materi baru.
 4. Memberikan materi pelajaran (*presenting the stimulus*), yaitu menyampaikan secara garis besar materi-materi pembelajaran yang telah direncanakan.
 5. Memberikan bimbingan belajar (pemberian penunjang belajar), dengan mengarahkan proses berfikir siswa agar lebih memahami kedepannya Nilai-nilai antikorupsi seperti kejujuran, integritas, tanggung jawab, dan kepedulian sangat penting dalam membangun budaya bersih dari korupsi (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2020).
- 2. Program pendukung penanaman karakter antiikorupsi di SMK PGRI 2 Cimahi**

Berdasarkan temuan dari hasil observasi dan wawancara di lapangan, dapat disimpulkan bahwa meskipun tidak terdapat program khusus yang secara eksplisit berlabel “Pendidikan Antikorupsi”, nilai-nilai antikorupsi telah terintegrasi secara menyeluruh dalam berbagai aktivitas pembelajaran dan kegiatan sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa sekolah memiliki komitmen dalam membangun karakter siswa, khususnya dalam aspek kejujuran, tanggung jawab, dan integritas. Pendekatan ini selaras dengan pandangan Ki Hajar Dewantara yang menekankan bahwa pendidikan harus memanusiakan manusia, yaitu membentuk manusia berakhlak mulia, kritis, dan mandiri. Sejalan pula dengan Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2003, yang menyatakan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat, cakap, kreatif,

mandiri, dan bertanggung jawab. Penanaman nilai-nilai antikorupsi secara tidak langsung mendukung pencapaian tujuan tersebut, karena antikorupsi merupakan bagian dari pembentukan karakter dan integritas. (Undang-Undang, Tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2003)

Peran utama dalam proses penanaman nilai-nilai ini dimainkan oleh guru, khususnya guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Dalam kegiatan belajar mengajar, guru PPKn menerapkan metode yang aplikatif dan interaktif seperti diskusi kelompok, studi kasus, pemutaran video edukatif, hingga proyek kreatif seperti pembuatan kampanye poster bertema antikorupsi. Pendekatan ini mendukung teori Gagné di dalam jurnal (Devi, Ujang, & Febrian, 2023) yang menekankan pentingnya atensi, penyampaian stimulus, dan pemberian bimbingan untuk membentuk pemahaman dan sikap siswa. Strategi ini juga sejalan dengan pendekatan yang dianjurkan (KPK, 2017) dan yang menganjurkan integrasi nilai-nilai antikorupsi ke dalam mata pelajaran PPKn melalui metode pembelajaran yang kontekstual dan berorientasi karakter. Karakter ini terdapat dalam Pancasila yang mencerminkan karakteristik bangsa Indonesia yang bersumberkan pada kebhinekaan budaya bangsa Indonesia. Dengan demikian maka karakter yang dikembangkan dalam Pancasila bercorak budaya bangsa dan berupa jati diri bangsa yang dapat dikembangkan untuk menguatkan karakter bangsa, selain bercirikan budaya bangsa nilai-nilai Pancasila pun kuat dengan nilai spiritualnya sehingga dapat mengisi ranah batiniah dan jasmani bangsa.

Pendidikan antikorupsi juga dapat dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan formal, baik sebagai mata pelajaran terpisah maupun sebagai bagian integral dari mata pelajaran yang ada, seperti studi sosial, kewarganegaraan, atau moral dan agama. Dengan memasukkan pendidikan antikorupsi ke dalam kurikulum, pentingnya integritas, etika, dan tanggung jawab sosial dapat dipromosikan secara terstruktur dan berkelanjutan (Lind, 2012). Peran guru sebagai fasilitator sekaligus

teladan (role model) dalam aktivitas sehari-hari di sekolah menjadi kunci dalam proses penanaman nilai-nilai antikorupsi kepada siswa. Guru tidak hanya menyampaikan materi, tetapi juga menunjukkan langsung sikap disiplin, adil, dan jujur dalam berbagai aspek kehidupan sekolah. Hal ini sejalan dengan teori pembelajaran sosial (Rest, 1986) dan (Bandura, 1977), yang menekankan bahwa individu, khususnya anak dan remaja, membentuk perilaku moral melalui proses observasi dan imitasi terhadap figur-figur otoritatif di lingkungan sosialnya. Dalam konteks ini, guru menjadi representasi konkret dari nilai-nilai antikorupsi yang dapat diteladani siswa secara langsung.

Di sisi lain, dukungan terhadap nilai-nilai antikorupsi juga diperkuat oleh peran Guru Bimbingan dan Konseling (BK), yang secara aktif memberikan pendampingan kepada siswa yang mengalami kesulitan dalam menerapkan nilai-nilai kejujuran dan integritas. Hal ini menguatkan teori pembelajaran sosial (Rest, 1986) yang menyatakan bahwa karakter peserta didik terbentuk melalui pengamatan dan interaksi dengan figur otoritas, dalam hal ini guru BK dan guru mata pelajaran, sebagai teladan moral di sekolah.

Selain itu, pihak sekolah turut menerapkan berbagai kebijakan internal yang mendukung penanaman karakter antikorupsi. Beberapa kebiasaan positif yang dibentuk di antaranya adalah pembiasaan hadir tepat waktu, pelaporan jujur atas pelanggaran, serta adanya sistem monitoring perilaku siswa yang dilakukan oleh wali kelas dan guru mata pelajaran secara berkala. Ini menunjukkan bahwa pendekatan pendidikan antikorupsi di sekolah telah menyentuh tiga komponen utama pendidikan karakter menurut (Lickona, 1999), yaitu *knowing the good*, *desiring the good*, dan *doing the good*. Siswa mengetahui pentingnya kejujuran, terdorong untuk bersikap jujur, dan benar-benar menunjukkan perilaku jujur dalam kehidupan sekolah.

Lingkungan sekolah juga secara aktif dijadikan media edukasi dengan pemasangan poster-poster bertema antikorupsi dan pelaksanaan

kegiatan ekstrakurikuler yang mengangkat nilai-nilai etika sosial dan kepedulian. Ini sejalan dengan teori dari (OECD, 2007) dan (UNESCO, 2008) yang menekankan pentingnya keterlibatan komunitas sekolah dan pendekatan pendidikan antikorupsi yang menyeluruh, baik dalam kelas maupun di lingkungan sekolah, sebagai strategi efektif untuk membentuk budaya antikorupsi.

Guru berperan sebagai fasilitator dan sekaligus teladan (*role model*) yang menunjukkan sikap disiplin, adil, dan jujur dalam aktivitas sehari-hari di sekolah. Hal ini sejalan dengan teori pembelajaran sosial dari (Rest, 1986) yang menekankan bahwa perilaku siswa terbentuk melalui proses observasi dan imitasi terhadap figur-figur signifikan di sekitarnya, termasuk guru. Pendekatan seperti ini didukung pula oleh pandangan dari (OECD, 2007) dan (UNESCO, 2008), yang menyatakan bahwa integrasi nilai-nilai etika dan antikorupsi dalam kurikulum secara kontekstual jauh lebih efektif daripada menjadikannya mata pelajaran terpisah. teori sistem nilai antikorupsi seperti yang dikemukakan oleh (International, 2022) dan (Galtung, 1969), korupsi dapat dicegah melalui pembentukan budaya integritas sejak dini melalui pendidikan. Galtung, dalam teorinya tentang “*structural corruption*”, menekankan pentingnya peran pendidikan dalam mengikis praktik dan pola pikir permisif terhadap korupsi melalui reformasi budaya, termasuk keteladanan dari figur otoritatif seperti guru. Oleh karena itu, guru tidak hanya menjadi pengajar, tetapi juga agen perubahan sosial yang strategis dalam membangun generasi antikorupsi.

Teori pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 3 tentang tujuan pendidikan nasional menyatakan bahwa pendidikan bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat, cakap, kreatif, mandiri, dan bertanggung jawab. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa siswa memiliki pemahaman yang baik tentang nilai-nilai antikorupsi, seperti kejujuran, tanggung jawab, dan

integritas. Hal ini tampak dari perilaku siswa dalam keseharian di sekolah, yang sejalan dengan nilai-nilai karakter tersebut. (Undang-Undang, Tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2003)

Upaya integratif ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya dalam Pasal 3 yang menekankan pentingnya pengembangan potensi peserta didik agar menjadi pribadi yang beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, serta bertanggung jawab sebagai warga negara. Oleh karena itu, penanaman nilai-nilai antikorupsi dalam pendidikan bukan hanya menjadi bagian dari penguatan karakter siswa, tetapi juga berkontribusi terhadap pembangunan kualitas bangsa di masa depan. (Undang-Undang, Tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2003).

Ditta (2019) menyatakan bahwa “*the most influential forces shaping youth are families, primarily parents*”, karena pengaruh dari orang tua, dan sanak saudara berpengaruh sangat besar dalam pembentukan karakter. Karena orang tua tidak hanya berperan dalam membesarkan anak-anaknya namun mereka juga berperan sebagai pendidik dalam kehidupan anaknya, maka peran pendidikan harus berjalan paralel dengan keluarga peserta didik. Sementara pengajar dengan tugas utamanya memberikan ilmu, keahlian, bersamaan dengan penanaman nilai moral, sering juga berperan menjadi orang tua di lingkungan pendidikan dan menerapkan pendidikan model *parenting* di mana jika tidak ada pemahaman yang sama dengan orang tua peserta didik sering terjadi saling tumpang tindih dan sangat sulit melihat bagaimana suatu bentuk pendidikan moral dapat berhasil tanpa adanya kerja sama antara pengajar dan orang tua siswa. Maka sebagai bagian penting dari program pendidikan pembentukan karakter adalah, adanya keterlibatan dari orang tua siswa yang menjadi faktor kunci.

3. Dampak penanaman nilai antikorupsi di SMK PGRI 2 Cimahi

Dampak penanaman nilai-nilai antikorupsi di SMK PGRI 2 Cimahi sangat terasa dalam perubahan sikap dan perilaku siswa yang lebih positif. Hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa siswa semakin menyadari bahaya dan dampak dari tindakan korupsi, baik secara hukum maupun moral.

Siswa menunjukkan sikap jujur, seperti tidak mencontek saat ujian, mengembalikan barang yang ditemukan, serta menunjukkan tanggung jawab terhadap tugas dan kebersihan lingkungan kelas. Bahkan, terdapat keberanian dari siswa untuk menolak atau melaporkan tindakan yang tidak etis kepada guru atau pihak sekolah. Suasana sekolah pun menjadi lebih kondusif dan mendidik. Teori pendidikan karakter menurut Lickona juga sangat relevan. Ia menyebutkan bahwa pendidikan karakter terdiri dari tiga komponen: *knowing the good*, *desiring the good*, dan *doing the good*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa siswa tidak hanya mengetahui nilai antikorupsi (*knowing*), tetapi juga memiliki keinginan menerapkannya (*desiring*) dan melakukan praktik nyata di sekolah (*doing*), seperti tidak menyontek, menolak perilaku tidak jujur, dan berani menyampaikan kebenaran. (Lickona, 1999)

Tidak ditemukan budaya menyontek atau perilaku manipulatif yang ditoleransi. Slogan dan visualisasi antikorupsi di dinding sekolah memperkuat nilai moral dalam keseharian siswa. Lebih jauh, siswa menunjukkan potensi untuk menjadi agen perubahan di lingkungannya. Keinginan mereka untuk menyebarkan semangat antikorupsi kepada teman-teman menjadi bukti bahwa pendidikan karakter yang dijalankan telah menyentuh aspek kesadaran dan tanggung jawab sosial.

Hakim (2012) menyebutkan tiga tujuan utama pendidikan antikorupsi, yakni membentuk pengetahuan, membangun sikap, dan membentuk keterampilan menolak korupsi. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa siswa tidak hanya tahu apa itu korupsi (*pengetahuan*), tetapi juga memiliki sikap menolak praktik tersebut dan

menunjukkan perilaku seperti menghindari menyontek dan bersikap jujur dalam tugas kelompok. Selain itu, pendekatan pembelajaran aktif seperti pembuatan poster dan kampanye nilai antikorupsi telah berhasil meningkatkan kesadaran moral siswa. Dampak positif ini mendukung pandangan (Rest, 1986) bahwa pengambilan keputusan moral yang sehat memerlukan pemahaman nilai, keberanian moral, dan kebiasaan baik yang dibentuk secara berulang. Ini sejalan dengan temuan (UNODC, 2013) bahwa pendidikan antikorupsi yang berbasis partisipasi dan pengalaman lebih efektif dalam membentuk karakter antikorupsi. Dalam hal ini, Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan (PPKn) memiliki peran sangat penting dalam menanamkan nilai-nilai antikorupsi kepada peserta didik. Melalui PPKn peserta didik di ajarkan untuk memahami dan mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila, seperti :

a. Kejujuran

Kejujuran merupakan salah satu karakter penting yang perlu di bina dan ditanamkan dalam diri setiap masing-masing warga negara. Dalam pembinaannya pendidik bisa memberikan materi-materi atau contoh implementasi dari kejujuran itu sendiri, sehingga peserta didik dapat meniru dan menerapkan hal tersebut. Selain itu, pendidik juga dapat berperan dalam memberikan pemaparan dari dampak ketidakjujuran, misalnya terjadinya tindakan korupsi yang dapat merugikan banyak pihak. Dengan hal tersebut, peserta didik mampu memahami bahwa kejujuran itu penting adanya dan sangat buruk akibatnya apabila tidak ada dalam diri seseorang.

b. Tanggung Jawab

Selain kejujuran, tanggung jawab juga merupakan salah satu karakter yang perlu untuk di tanamkan pada diri setiap orang. Pendidik dapat membina peserta didik, melalui cara mengajarkan bagaimana memelihara amanah ketika di tugaskan dan memberitahu apa dampak dari orang yang tidak bertanggung jawab. Dengan hal

tersebut, maka peserta didik dapat menjalankan kehidupannya sesuai dengan apa yang telah di amanahkan dan lebih bertanggung jawab terhadap apa yang ia lakukan, serta dapat terbebas dari perbuatan- perbuatan yang tidak baik, seperti contohnya melakukan suap menyuap dari uang Negara (korupsi) terhadap tugas atau jabatan yang ia tempati.

c. Keberanian Sebagai pendidik

hal yang dapat di terapkan pada diri masing- masing peserta didik adalah melatih atau menanamkan keberanian pada masing- masing anak. Berani untuk mengatakan yang benar dan yang salah karena itu adalah hal paling penting dalam mengembangkan nilai- nilai anti korupsi. Mengapa? Karena dengan adanya keberanian maka peserta didik nantinya dapat berani untuk mengatakan kebenaran terhadap aparat hukum dari perbuatan buruk yang telah dilakukan seseorang, dimana perbuatan itu sendiri sangat merugikan banyak orang, salah satunya adalah korupsi.

d. Keadilan

Keadilan merupakan suatu sikap dimana seseorang mampu menempatkan sesuatu pada tempatnya sesuai dengan kebutuhannya. Keadilan pada warga negara perlu dibina dan ditindaklanjuti sejak dini agar tertanam dalam diri warga negara sikap keadilan. Jika dalam diri seorang warga negara sudah tertanam sikap keadilan, maka kehidupan berbangsa dan bernegara akan semakin harmonis, dengan penegak- penegak hukum dan masyarakat yang saling memahami posisi hak dan kewajibannya masing masing. Dengan pengamalan sikap adil yang baik pada warganegara maka tindakan kecurangan atau korupsi akan semakin berkurang dan lama kelamaan akan hilang.

e. Kesederhanaan

Kesederhanaan juga perlu untuk diterapkan dalam dunia pendidikan, terutama pendidikan Anti Korupsi. Karena dengan

diterapkannya pendidikan karakter kesederhanaan tersebut maka dapat membuat para peserta didik terjauhkan dari perbuatan korupsi. Terjadinya perbuatan korupsi sudah tentu di karenakan orang- orang yang menginginkan kehidupan penuh dengan kemewahan tetapi merugikan banyak orang. Dengan di ajarkan nya pendidikan karakter salah satunya yaitu kesederhanaan diharapkan dapat menumbuhkan para generasi muda yang Anti Korupsi. (Sumiarti, 1970).

Bandura (1977) menekankan bahwa peserta didik dapat membentuk nilai dan perilaku melalui proses observasi, imitasi, dan model sosial. Dalam konteks ini, guru dan lingkungan sekolah berfungsi sebagai model perilaku antikorupsi yang akan diinternalisasi oleh siswa. Dampaknya, siswa bukan hanya paham nilai, tetapi juga meniru dan menerapkan dalam tindakan nyata, seperti bersikap jujur dan adil dalam tugas kelompok maupun kehidupan sehari-hari.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di SMK PGRI 2 Cimahi, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pemahaman yang baik mengenai nilai-nilai antikorupsi di SMK PGRI 2 Cimahi terlihat dari keaktifan mereka dalam pelajaran PPKn, terutama saat membahas topik antikorupsi. Siswa menunjukkan sikap antusias, mampu berdiskusi, serta memahami pentingnya nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan integritas. Nilai-nilai antikorupsi diajarkan tidak hanya melalui materi di kelas, tetapi juga melalui metode yang menarik seperti diskusi, studi kasus, dan pembuatan media visual. Guru juga memberikan contoh nyata melalui sikap dan perilaku, sehingga siswa dapat meniru dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari di sekolah.

Penanaman nilai-nilai antikorupsi ini membantu siswa tidak hanya tahu apa itu korupsi, tetapi juga membentuk sikap dan kebiasaan menolak segala bentuk kecurangan, seperti menyontek atau tidak bertanggung jawab dalam tugas. Upaya ini sejalan dengan tujuan pendidikan nasional, yaitu membentuk siswa menjadi pribadi yang beriman, berakhlak mulia, mandiri, dan bertanggung jawab. Pendidikan antikorupsi di sekolah ini telah menjadi bagian penting dalam membangun karakter siswa agar menjadi generasi yang jujur dan peduli terhadap lingkungan sosialnya.

2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun tidak ada program khusus yang diberi label “Pendidikan Antikorupsi”, karakter siswa mengenai antikorupsi telah diterapkan secara menyeluruh melalui kegiatan belajar mengajar dan aktivitas sekolah. Sekolah menunjukkan komitmen dalam membentuk karakter siswa, terutama dalam hal kejujuran, tanggung jawab, dan integritas.

Peran guru, khususnya guru PPKn, sangat penting dalam proses ini. Guru menggunakan metode pembelajaran yang interaktif, seperti diskusi, studi kasus, menonton video, hingga membuat poster kampanye antikorupsi. Guru juga menjadi teladan dalam bersikap jujur dan disiplin, sehingga siswa bisa meniru langsung dari lingkungan sekolahnya. Selain guru PPKn, guru BK juga membantu siswa yang mengalami kesulitan dalam menerapkan nilai-nilai kejujuran dan integritas. Sekolah juga memiliki kebijakan dan kebiasaan positif seperti datang tepat waktu, pelaporan jujur, serta sistem pemantauan perilaku siswa oleh wali kelas dan guru. Lingkungan sekolah mendukung nilai-nilai ini dengan poster antikorupsi dan kegiatan ekstrakurikuler yang menanamkan etika dan kepedulian sosial. Pendekatan ini sesuai dengan pandangan para ahli dan teori pendidikan yang menyatakan bahwa nilai antikorupsi sebaiknya diajarkan melalui keteladanan dan pembiasaan, bukan hanya lewat teori di kelas. Dengan strategi yang menyeluruh dan keterlibatan semua pihak, penanaman nilai antikorupsi di SMK PGRI 2 Cimahi telah berjalan dengan baik dan mendukung terbentuknya karakter siswa yang jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas.

3. Penanaman nilai-nilai antikorupsi di SMK PGRI 2 Cimahi memberikan dampak positif terhadap sikap dan perilaku siswa. Siswa menjadi lebih jujur, bertanggung jawab, dan berani menolak serta melaporkan tindakan yang tidak etis. Mereka juga menunjukkan kesadaran akan bahaya korupsi, serta berperilaku lebih disiplin dan peduli terhadap lingkungan. Hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa siswa tidak hanya memahami nilai antikorupsi, tetapi juga menerapkannya dalam kehidupan sekolah, seperti tidak mencontek, mengembalikan barang yang ditemukan, dan menyelesaikan tugas dengan jujur. Suasana sekolah menjadi lebih kondusif, dan nilai-nilai moral semakin menguat dalam keseharian siswa.

Melalui pembelajaran PPKn, siswa diajarkan nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, keberanian, keadilan, dan kesederhanaan.

Nilai-nilai ini membentuk karakter siswa yang siap menjadi generasi antikorupsi dan agen perubahan di masyarakat. Siswa juga lebih sadar akan pentingnya etika dan tanggung jawab sosial. Dengan strategi pembelajaran yang aktif dan berbasis pengalaman, pendidikan antikorupsi di sekolah ini berhasil membentuk karakter siswa yang tidak hanya tahu dan paham tentang korupsi, tetapi juga mampu menolak dan menghindari praktiknya dalam kehidupan sehari-hari.

B. Saran

Bersdasarkan hasil penelitian, peneliti menyarankan hal-hal berikut:

1. Untuk Sekolah

Perlu di kembangkan program formal atau terstruktur yang berfokus pada Pendidikan antikorupsi, seperti kampanye rutin, seminar, atau kegiatan literasi nilai. Selain itu, penguatan kebijakan internal yang lebih eksplisit mengenai nilai antikorupsi dapat mendukung terciptanya budaya sekolah yang lebih kuat.

2. Untuk Guru PPKn

Diharapkan terus mengembangkan metode pembelajaran yang inovatif, partisipatif, dan kontekstual agar nilai-nilai antikorupsi semakin mudah dipahami dan dihayati oleh siswa. Kolaborasi antara guru PPKn dan BK dalam membentuk karakter siswa perlu lebih ditingkatkan.

3. Untuk Siswa

Diharapkan agar terus menumbuhkan sikap kritis dan kesadaran terhadap pentingnya kejujuran, integritas, dan tanggung jawab, baik di lingkungan sekolah maupun di masyarakat. Siswa juga diharapkan mampu menjadi teladan dan agen perubahan bagi lingkungannya.

4. Untuk Penelitian Selanjutnya

Diharapkan dapat melanjutkan penelitian ini dengan cakupan yang lebih luas, misalnya dengan membandingkan implementasi pendidikan antikorupsi di beberapa sekolah atau meneliti efektivitas program yang telah dilaksanakan secara formal.

DAFTAR PUSTAKA

- Ab , M., & Firman, R. (2019). *Pemikiran Ki Hadjan Dewantara Tentang Pendidikan*.
- Abd, R. B., Sabhayati, A. M., Andi, F., Yuyun, K., & Yumriani. (2022, Juni 1). Pengertian Pendidikan, Ilmu Pendidikan Dan unsur-Unsur Pendidikan. *Al Urwatul Wutsqa*.
- Achmad, S. A., Afrian, D. Y., & Elly, N. R. (2018). AKSIPOB (Antikorupsi pop up book) sebagai media pembelajaran pendidikan antikorupsi berbasis kearifan lokal di SD Negeri 1 keputran yogyakarta. 146.
- Aksi, i. (2022). *Memahami 9 nilai prinsip Antikorupsi*. Pusat Edukasi Antikorupsi.
- Arianti. (2018). Peranan Guru Dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa. *Didaktika Jurnal Kependidikan, 12, no 2*.
- Arikunto, S. (2014). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka.
- Arnie, F. (2024). *Pengantar Pendidikan Antikorupsi (Teori, Metode, Praktek)*. Widina Media Utama.
- Bagdawansyah, A., Kurniawansyah, & Ahmad, F. (2021, juli). Habitiasi Nilai-Nilai Karakter Sebagai Perilaku Anti Korupsi Pada Masyarakat Kajang. *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagamaan, 8 No 1*, 10-29. Retrieved from <https://juridiksiam.unram.ac.id/index.php/juridiksiam>
- Bandura, A. (1977). Social Learning Theory. *Englewood Cliffs*.
- Creswell, J. (2010). *Research Design : pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed*. Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar.
- Dayu, R. P., Muhammad, M. A., & Nur, A. (2021). Model dan Strategi Penanaman Nilai-Nilai Antikorupsi di Sekolah dasar. *Bhineka Tunggal Ika, 8*, 21-31.
- Devi, F., Ujang, J., & Febrian, A. B. (2023). pendidikan pancasila dan kewarganegaraan sebagai sikap nilai-nilai anti korupsi. *jurnal ilmiah pendidikan*.
- Ditta, A. (2019). The most influential forces shaping youth are families.
- Donny , G. A. (2002). *Pendidikan memang multikultural*. jakarta: yayasan sains estetika dan teknologi.
- Dossy , I. P., & Bernard L, T. (2011). *Hukum Etika dan Kekuasaan*. Yogyakarta: Genta.

- Dwina, P. (n.d.). Korupsi Dan Perilaku Koruptif.
- Evi, H. (2008). Tindak Pidana Korupsi.
- Evi, H. (2009). *Tindakan Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fattah, N. (2008). *Landasan Manajemen Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Febriyanti, N. (2021). Implementasi Konsep pendidikan Menurut Ki Hajar Dewantara. *Jurnal Pendidikan*, 1631-1638.
- Fella, S. (2019, April). Analisa Peran Budaya Sekolah yang Religius dalam Pembentukan Karakter Siswa. *Indonesian Values And Character Education Journal*.
- Freire, P. (1970). *Pedagogy of the Oppressed*.
- Galtung, J. (1969). Violence, Peace and Research. *Journal Of Peace Research*, 167-191.
- Gusti Ayu, D. d. (2016). *Klinik Hukum Anti Korupsi Edukasi Pencegahan Melalui Street Law*. Denpasar Bali: Udayana University Press.
- Hakim, L. (2012). *Model integrasi pendidikan antikorupsi dalam kurikulum pendidikan islam*. jurnal pendidikan agama islam.
- Hamalik, O. (2006). *Proses belajar Mengajar* . Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Hamilton-Hart, N. (2001). *Anri-Corruption Strategies in Indonesia*. Bulletin of Indonesia Economic Studies.
- Hassan, F. (2004). *Pendidikan adalah pembudayaan : dalam pendidikan manusia indonesia*. Jakarta: PenerbitKompas.
- Hendra. (2019). *Kinerja Tin Sapu Bersih Pungutan Liar (SABER PUNGLI) Polisi Resort (POLRES) Di Kabupaten Enrekang*. Makassar: Admin Digital Library.
- Hilman, J. (2004). Nietzsche: On power and morality. In Master-slave morality. 62-96.
- Iman, R., Soca, A., Dzikril, H., & Kalfin, F. N. (2024, Juni). Penanaman Budaya Anti Korupsi Dalam Rangka Penanggulangan Korupsi Di Indonesia. *MANDUB : Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 2.
- Indonesia, T. R. (2008). *Kamus Besar Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.
- International, T. (2022). *Topic guide on corruptin in education*.

- J.Moleong, L. (2014). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- JEREMY, P. (2008). *Strategi memberantas Korupsi: Elemen Sistem Integritas Nasional*. Jakarta: Tansparency Internasional Indonesia dengan Yayasan Obor Indonesia dan TI indonesia.
- Joao, G. M., & Ronaldo, P. (2022). Why are the corrupt, corrupt? : the multilevel analytical model of corruption. *Cambridge University press*, 1-13.
- Junaidin, B., Husna, S., & Irma , I. (2022, Mei 1). Pendidikan Anti Korupsi Dan Pengaruhnya Terhadap Integritas Mahasiswa. *Al Marhalal*, 6, 10-18.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2020). *modul pendidikan antikorupsi untuk perguruan tinggi*.
- Komisi, P. K. (2012). *Modul pendidikan antikorupsi untuk perguruan tinggi*. Jakarta: KPK.
- Komisi, P. K. (2025). *KPK gencarkan pendidikan anti korupsi, tanamkan nilai integritas sejak dini*.
- Kosasih, D. (1999). strategi dan model pembelajaran .
- KPK. (2017). *Buku Model Inseri Pendidikan Antikorupsi Melalui Mata Pelajaran PPKn*. Jakarta: pusat edukasi antikorupsi.
- Kurniati, Rohmad, W., & Budiono. (2018, November). Peranan Guru PPKn Dalam Pembentukan Kedisiplinan Siswa Dalam MAN Malang 1. *Jurnal Civic Hukum*, 3.
- Lestari, E. Y. (2019). menumbuhkan kesadaran nasionalisme generasi muda di era globalisasi melalui penerapan nilai-nilai pancasila. *ADIL Indonesia Journal*, 20-27.
- Lickona, T. (1999). *Character Education*. Instructional-design Theories and models.
- Lind. (2012). Practical Ethics For Students, Interns, and Residents: A Short Reference Manual. *Kager Medical and Scientific Publishers*.
- Mochtar, L. (2008). *Negara dan Korupsi*. Jakarta: Yayan Obor Indonesia.
- Moh, U. U. (2010). *Menjadi Guru Profesional*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Monalisa, S., Rince, M., & Hotmaid, S. (2024). *Pendidikan Anti Korupsi*. (M. Aas, Ed.)

- Mulyasa, E. (2009). *Menjadi Guru Profesional*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Ni Ketut, D. Y. (2023, Januari). Pentingnya Pendidikan Anti Korupsi Dalam Menumbuhkan Budaya Anti Korupsi. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 3 Nomor 1, 27.
- Nurul, H., Sari, R. A., Ilham, H., Winda, A., Shakila, P., Abelia, A., . . . Hanisah, P. (2024). Peran Pendidikan Antikorupsi Dalam Mencegah Korupsi Sejak Dini Melalui Sosialisasi Di SMP 4 Muhammadiyah pekanbaru. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Transformasi Kesejahteraan*, 1 nomor.4.
- OECD. (2007). *education and integrity: the role of school in preventing corruption*.
- Rasyidi, M. (2020). korupsi adalah suatu perbuatan tindak pidana yang merugikan negara dan rakyat serta melanggar ajaran agama. *jurnal universitassuryadarma*, 37-51.
- Rest, J. R. (1986). *Moral Development: Advances in Research and Theory*, Praeger.
- Rober, K. (1988). *Controlling Corruption*. Californis: the Regentpf the university.
- Sajipto. (1983). *Hukum dan Perubahan sosial*.
- Sri Rezki, M. A. (2020). *Implementasi Pendidikan Antikorupsi Pada Mata Kuliah Pkn Berbasis Project Citizen Di STMIK Royal Kisaran*. *journal of Science and Social Research*.
- Sudarto. (1983). *hukum dan hukum pidana*.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumiarti, S. (1970). Pendidikan Anti-Korupsi. *Jurnal Pemikiran Alternatif Kependidikan*, 189-207.
- Sutrisno, E. (2017). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Kencana.
- Syed, H. A. (1999). *Corruption and the destiny of asia*. Bandar Sunway.
- Syed, H. A. (1999). *Corruption and the destiny of asia*. Bandar Sunway.
- Tri Lilin, N. Z. (2022, Mei). Peran Guru PPKn Dalam Menumbuhkan Kesadaran Diri Siswa Terhadap Tata Tertib Sekolah. *EDUCATIVO:JURNAL PENDIDIKAN*.
- Trisna, W. (2022). *Isi Pasal 31 Ayat 1-5 UUD 1945 dan Hak Warga Negara Indonesia*. Jakarta: DetikEdu.

- Umam, H. (2013). *Korupsi dan pengaruhnya terhadap pemerintahan dan perekonomian nasional*. Jakarta.
- Undang-Undang, R. I. (2023). *Undang-Undang Republik Indonesia*. Jakarta: Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia.
- Undang-undang, R. (2003). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan.
- Undang-Undang, R. I. (2003). *Tentang Sistem Pendidikan*. Jakarta.
- Undang-Undang, R. I. (2003). *Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Sekretaris Negara Republik Indonesia.
- UNESCO. (2008). Teaching Ethics and Corruption Prevention at School.
- UNODC. (2013). Education for Justice Anti-Corruption Education in Schools.
- Widati, W., Sigid, S., Aanodyo, S., Erika, M. C., Nella, S. P., & Budi, A. A. (2018). *modul pendidikan anti korupsi universitas padjadjaran*. unpad press.
- Widya, W. F., & Anggraeni, D. D. (2024). Globalisasi dan nasionalisme pada generasi Z. *Jurnal Pendidikan Tambusai* .
- Wilhelmus, O. R. (2017). korupsi : teori, faktor penyebab, dampak, dan penanganannya. *jurnal pendidikan agama katolik*.
- Yayan, A. (2019). Pentingnya Pendidikan Bagi Manusia. *Society*, 1-19.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Permohonan Izin Penelitian



YAYASAN PENDIDIKAN TINGGI PASUNDAN
SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
(STKIP) PASUNDAN

Akreditasi Perguruan tinggi: TERAKREDITASI B

Keputusan BAN-PT Nomor: 1708/SK/BAN-PT/AK.Pp/PT.K/2022

Program Sarjana (S1) PJKR, PPKn, dan Pendidikan Bahasa Inggris

Program Sarjana (S2) Pendidikan IPS dan Pendidikan Jasmani

Jl. Permanan No.32B Kota Cimahi 40512, Telp. (022) 6628311, Fax. (022) 6630345 website: www.stkipasundan.ac.id

Nomor : 507/MHS/STKIP.PAS/VI/2025
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada

Yth. SMK PGRI 2 Cimahi

di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat kami sampaikan bahwa untuk kepentingan menyusun skripsi sebagai tugas akhir perkuliahan di STKIP Pasundan Cimahi, dengan ini kami mohon kesediaan Bapak/Ibu agar berkenan mengizinkan mahasiswa kami:

Nama : YUSRIL PUTRA NUGRAHA
NIDN : 21500035
Program Studi : Pendidikan pancasila dan kewarganegaraan
Status : Mahasiswa

Judul Penelitian :

**IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DALAM PEMBELAJARAN
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN DI SMK 2 PGRI CIMAHI**

Untuk melakukan penelitian pada instansi/unit yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian permohonan izin ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Cimahi, 10 Juni 2025
Wakil Ketua Bidang Akademik (DIKJAR),
Kemahasiswaan, Alumni, Budaya dan
Agama.



Dr. Akhmad Olih Solihin, M.Pd.
NIP. 1814053

Lampiran 2 Surat Balasan Permohonan Izin Penelitian



PERWAKILAN YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN BIDANG PENDIDIKAN
PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA
(YPLP- PGRI)
KOTA CIMAHI

SMK PGRI 2 CIMAHI

STATUS AKREDITASI "A"

BIDANG KEAHLIAN BISNIS MANAJEMEN DAN KESEHATAN

Website: smkpgri2cimahi.sch.id E-mail: smkpgri2.cimahi@gmail.com

Alamat : Jl. Encep Kartawiria No. 153 Telepon (022) 6654310 Cimahi 40512 NPSN-20224129

SURAT KETERANGAN

Nomor : 295 /SMKPGRI 2/III.5/G. 25

Referensi : Berdasarkan Surat Permohonan dari STKIP Pasundan Nomor :
507/MHS/IKIP.PAS/VI/2025 tertanggal 10 Juni 2025. perihal Permohonan Izin
Penelitian

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala SMK PGRI 2 Cimahi menerangkan dengan sesungguhnya
bahwa :

Nama : Yusril Putra Nugraha
NIM : 21500035
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Jenjang : S1

Yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian di sekolah kami. Sehubungan yang bersangkutan
sedang menyusun skripsi dengan judul :

**"IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DALAM PEMBELAJARAN PENDIDIKAN
PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN DI SMK PGRI 2 CIMAHI"**

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sesungguhnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Cimahi, 12 Juni 2025
Kepala Sekolah,



Drs. RIZA MUNANDAR
NUPTK. 7153 7416 4420 0013

PEDOMAN WAWANCARA
IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI
DALAM PEMBELAJARAN PPKn DI SMK PGRI 2 CIMAHI

A. Tujuan

Untuk mendapatkan informasi mendalam mengenai pelaksanaan, strategi, hambatan, dan hasil implementasi Pendidikan antikorupsi melalui pembelajaran PPKn

B. Pedoman Wawancara untuk Guru PPKn

1. Bagaimana Bapak/Ibu memaknai pentingnya pendidikan antikorupsi bagi siswa SMK?

R2 : Membentuk karakter berintegritas dan mencegah korupsi di masa depan

2. Apakah nilai-nilai antikorupsi sudah termuat dalam kurikulum PPKn? Jika ya, bagaimana cara mengintegrasikannya?

R2 : Ya sudah, cara mengintegrasikan Dapat dilakukan dg beberapa cara baik dalam pendidikan, kehidupan sehari-hari / dlm konteks sosial dan politik

3. Metode pembelajaran apa saja yang digunakan untuk menanamkan nilai-nilai antikorupsi kepada siswa?

R2 : Ada beberapa metode, yaitu model terintegrasi dlm mata pelajaran, model pembiayaan pembiasaan nilai dalam seluruh aktivitas serta suasana sekolah. Model di luar pembelajaran melalui kegiatan ekstrakurikuler

4. Sejauh mana siswa merespons materi atau nilai antikorupsi dalam pembelajaran?

R2 : Siswa cenderung merespon positif dalam pembelajaran, khususnya ketika pendekatan pembelajaran yg digunakan menarik dan relevan dlm kehidupan sehari-hari

5. Apa saja kendala yang Bapak/Ibu hadapi dalam menyampaikan pendidikan antikorupsi?

R2 : Kendalanya antara lain, tekanan politik, lemahnya koordinasi antar lembaga, budaya korupsi yg masih kuat dan kurangnya dukungan publik

6. Bagaimana peran sekolah dalam mendukung penguatan nilai integritas di luar jam pelajaran?

R2 : Melalui berbagai kegiatan dan pendekatan. Ini termasuk penguatan budaya sekolah

C. Pedoman Wawancara untuk Kepala Sekolah / Wakil Kepala Sekolah

1. Apa kebijakan sekolah dalam mendukung pendidikan karakter, khususnya nilai-nilai antikorupsi?

R1: Sekolah menyusun merendahkan program pendidikan karakter melalui pembinaan setelah pelaksanaan kegiatan sholat dhuha dan penegakan tata tertib siswa yg ditentukan dialaminya ada nilai-nilai

2. Apakah ada program khusus yang dirancang sekolah untuk mendukung pembelajaran antikorupsi?

R1: Tidak ada.. program pendidikan antikorupsi diintegrasikan dengan kegiatan pembiasaan lain

3. Bagaimana bentuk pengawasan atau evaluasi terhadap pelaksanaan nilai integritas di sekolah?

R1: Melalui Pencatatan pelanggaran tata tertib kemudian dikomunikasikan dengan walikelas dan BK

D. Pedoman Wawancara untuk Guru BK

1. Apakah nilai-nilai kejujuran dan integritas menjadi bagian dari pembinaan siswa?

R3: pembentukan karakter untuk mencegah perilaku menyimpang

2. Apa bentuk pelanggaran yang sering dilakukan siswa terkait integritas dan bagaimana penanganannya?

R3: bimbingan pribadi atau konseling untuk memahami alasan melakukan pelanggaran

E. Pedoman Wawancara untuk Siswa

1. Apa yang kamu ketahui tentang korupsi dan dampaknya bagi masyarakat?

R4: Menurut saya, korupsi adalah kejahatan besar yang merugikan banyak orang. Ia bukan hanya soal uang, tapi soal keadilan dan moral. Korupsi

membuat rakyat menderita, pelayanan publik jadi buruk, dan kepercayaan terhadap pemerintah hilang. Kita semua harus mulai dari diri sendiri untuk jujur dan berani menolak korupsi.

R5: Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi, dampaknya membuat pembangunan terhambat dan rakyat dirugikan, sehingga memperlambat kemajuan negara

2. Apakah kamu pernah belajar tentang nilai-nilai antikorupsi dalam pelajaran PPKn? Ceritakan pengalamannya.

R4: Menurut saya, belajar nilai antikorupsi di PPKn sangat penting karena mengajarkan kejujuran, tanggung jawab, dan integritas. Biasanya lewat diskusi, nonton video, atau buat poster tentang bahaya korupsi. Itu membantu kita sadar pentingnya jujur sejak dini.

R5: Ya, saya pernah belajar tentang nilai-nilai antikorupsi di pelajaran PPKn, Guru saya menjelaskan pentingnya kejujuran, tanggung jawab, dan integritas melalui cerita dan diskusi kelompok. Kami juga diberi tugas untuk membuat poster kampanye antikorupsi, yang membuat saya lebih paham bagaimana mencegah dan melawan korupsi sejak dini.

3. Menurutmu, bagaimana guru menyampaikan nilai-nilai tersebut?

R4: Menurut saya, guru menyampaikan nilai-nilai antikorupsi lewat cerita, diskusi, contoh kasus nyata, dan kegiatan seperti debat atau membuat poster. Dengan cara itu, siswa lebih mudah memahami dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

R5: Guru menyampaikannya lewat cerita, diskusi, dan tugas yang menarik.

4. Apakah kamu merasa nilai-nilai seperti kejujuran dan tanggung jawab diterapkan di lingkungan sekolah?

R4: Ya, menurut saya nilai-nilai seperti kejujuran dan tanggung jawab cukup sering diterapkan di lingkungan sekolah, misalnya saat ujian harus jujur, mengerjakan tugas tepat waktu, dan menjaga kebersihan kelas

R5: Ya, saya merasa nilai-nilai seperti kejujuran dan tanggung jawab cukup diterapkan di sekolah.

5. Apa yang akan Anda lakukan jika Anda menyaksikan atau mengetahui adanya tindakan korupsi?

R4: Jika saya menyaksikan atau mengetahui adanya tindakan korupsi, saya akan melaporkannya kepada pihak yang berwenang, seperti guru, kepala sekolah, atau lembaga terkait. Diam saja berarti membiarkan kejahatan terus terjadi. Melapor adalah bentuk keberanian dan tanggung jawab sebagai warga yang peduli keadilan.

R5: Misalnya, kami diajarkan untuk selalu mengembalikan barang yang bukan milik kami, Guru dan staf sekolah juga memberikan contoh yang baik dalam bersikap jujur dan bertanggung jawab.

6. Bagaimana anda akan merespon jika diminta untuk terlibat dalam tindakan korupsi ?

R4: Saya akan menolak dengan tegas dan menjelaskan bahwa tindakan korupsi itu salah dan merugikan banyak orang. Saya juga akan mengingatkan bahwa kejujuran dan tanggung jawab lebih penting daripada keuntungan sesaat. Jika perlu, saya akan melaporkan agar tidak terjadi kerugian lebih besar.

R5: Saya akan melaporkannya kepada pihak yang berwenang atau guru jika terjadi di lingkungan sekolah

7. Menurut anda apa yang dapat dilakukan oleh siswa atau remaja untuk mencegah korupsi?

R4: Menurut saya, siswa atau remaja bisa mencegah korupsi dengan cara jujur dalam belajar dan berperilaku, tidak ikut-ikutan melakukan kecurangan, serta berani menolak dan melaporkan jika melihat tindakan korupsi. Mereka juga bisa menyebarkan kesadaran tentang bahaya korupsi lewat kegiatan seperti membuat poster atau mengajak teman diskusi tentang pentingnya integritas.

R5: Saya akan menolak dengan tegas dan menjauh dari tindakan tersebut

8. Bagaimana peran Pendidikan dalam membentuk karakter anti korupsi?

R4: Pendidikan berperan penting dalam membentuk karakter anti-korupsi dengan menanamkan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan integritas sejak dini. Melalui pelajaran, diskusi, dan contoh nyata, siswa diajarkan

untuk mengenali dampak buruk korupsi dan pentingnya sikap jujur dalam kehidupan sehari-hari. Dengan begitu, pendidikan membantu membentuk generasi yang berani menolak korupsi dan berperilaku etis.

R5: siswa/remaja dapat mencegah korupsi dengan membiasakan diri bersikap jujur, tidak mencontek, disiplin, dan berani menolak tindakan curang.

9. Apa harapan anda terhadap masa depan pemberantasan korupsi Indonesia?

R4: Menurut saya, harapan terbesar untuk masa depan pemberantasan korupsi di Indonesia adalah semakin kuatnya komitmen dari semua pihak—pemerintah, lembaga, dan masyarakat—untuk terus melawan korupsi secara tegas dan transparan. Pendidikan antikorupsi yang konsisten sejak dini juga sangat penting supaya generasi muda tumbuh dengan nilai kejujuran dan tanggung jawab. Dengan begitu, Indonesia bisa menjadi negara yang lebih bersih, adil, dan maju.

R5: Harapan saya, terciptanya sistem yang lebih transparan, adil, dan bersih, didukung oleh penegakan hukum yang tegas. Saya juga berharap generasi muda tumbuh dengan kesadaran antikorupsi yang kuat, sehingga budaya jujur dan bertanggung jawab menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

PEDOMAN OBSERVASI
IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI
DALAM PEMBELAJARAN PPKn DI SMK PGRI 2 CIMAHI

A. Tujuan

Untuk memperoleh informasi dan data baik secara langsung proses implementasi Pendidikan antikorupsi dalam kegiatan pembelajaran PPKn daMelalui Pencatatan pelanggaran tata tertib kemudian dikomunikasikan dengan walikelas dan BKn aktivitas sekolah.

B. Aspek yang diamati :

No	Aspek Pengamatan	Indikator	Keterangan
1	Kegiatan Pembelajaran PPKn	<ol style="list-style-type: none">1. Materi yang berkaitan dengan nilai antikorupsi2. Metode pembelajaran yang digunakan3. Interaksi guru dan siswa dalam membahas nilai integritas	<p>1. Guru menunjukkan kesiapan dalam pembelajaran dengan menyampaikan materi yang relevan dan berkaitan dengan nilai-nilai anti korupsi. Hal ini terlihat dari pemilihan topik yang kontekstual serta penggunaan pendekatan pembelajaran yang mampu menggugah kesadaran siswa tentang pentingnya integritas dan kejujuran dalam kehidupan sehari-hari.</p> <p>Guru juga</p>

			<p>menggunakan media dan metode yang mendukung pemahaman siswa terhadap nilai-nilai antikorupsi.</p> <p>2. Guru mencerminkan sikap sebagai teladan dalam pembelajaran, baik dari segi sikap maupun tutur kata selama proses mengajar. Guru menunjukkan konsistensi antara apa yang diajarkan dengan perilaku sehari-hari di kelas. Misalnya, guru mencontohkan sikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab dalam berbagai situasi, sehingga dapat menjadi panutan bagi siswa. Perilaku ini menjadi pembelajaran tidak langsung (implisit) bagi siswa dalam menanamkan nilai-nilai antikorupsi.</p> <p>3. Guru menggunakan metode pembelajaran</p>
--	--	--	--

			<p>aktif seperti diskusi kelompok, studi kasus, dan tanya jawab yang mendorong siswa untuk berpikir kritis dan mengemukakan pendapatnya mengenai isu-isu antikorupsi. Selain itu, siswa juga diberi kesempatan untuk menceritakan pengalaman pribadi atau kejadian yang mereka ketahui berkaitan dengan perilaku korupsi di lingkungan sekitar. Dengan begitu, pembelajaran menjadi lebih bermakna karena dikaitkan langsung dengan kehidupan nyata siswa.</p>
2	Peran Guru sebagai Teladan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sikap guru selama pembelajaran 2. Penerapan nilai-nilai kejujuran dan kedisiplinan oleh guru 	<p>1. Guru mencerminkan sikap sebagai teladan dalam pembelajaran, baik dari segi sikap maupun tutur kata selama proses mengajar. Guru menunjukkan konsistensi antara apa</p>

			<p>yang diajarkan dengan perilaku sehari-hari di kelas. Misalnya, guru mencontohkan sikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab dalam berbagai situasi, sehingga dapat menjadi panutan bagi siswa. Perilaku ini menjadi pembelajaran tidak langsung (implisit) bagi siswa dalam menanamkan nilai-nilai antikorupsi.</p> <p>2. ada ya pembinaan karakter bagi siswa siswa yang telat masuk sekolah</p>
3	Partisipasi Siswa	<p>Antusiasme siswa dalam mengikuti diskusi terkait nilai antikorupsi dan Keaktifan bertanya/berpendapat</p>	<p>Siswa menunjukkan antusiasme yang tinggi selama proses pembelajaran berlangsung. Hal ini terlihat dari keterlibatan aktif mereka dalam diskusi kelas, respons cepat terhadap pertanyaan guru, serta inisiatif siswa untuk mengajukan pertanyaan</p>

			<p>yang menunjukkan rasa ingin tahu terhadap materi yang dibahas. Banyak siswa yang berpartisipasi secara aktif, tidak hanya mendengarkan, tetapi juga menyampaikan pendapat, argumen, dan pertanyaan yang kritis, terutama dalam konteks nilai-nilai antikorupsi. Antusiasme ini mencerminkan adanya motivasi internal dari siswa untuk memahami materi secara mendalam dan menunjukkan bahwa pendekatan pembelajaran digunakan guru mampu menarik minat belajar siswa.</p>
4	Lingkungan Sekolah	Budaya sekolah yang mendorong kejujuran (misalnya tidak ada budaya menyontek, transparansi) Adanya poster/slogan tentang antikorupsi	Lingkungan sekolah menunjukkan komitmen terhadap pembentukan karakter antikorupsi dengan menciptakan suasana yang kondusif dan mendidik. Hal ini

			<p>tampak dari tidak adanya budaya menyontek di kalangan siswa, yang menjadi indikator kuat bahwa nilai kejujuran telah tertanam dalam keseharian mereka. Selain itu, pihak sekolah juga secara aktif menyosialisasikan nilai-nilai antikorupsi melalui media visual seperti poster, slogan, atau mural yang dipasang di berbagai sudut sekolah. Poster-poster tersebut berisi pesan moral yang mengajak siswa untuk menolak segala bentuk kecurangan dan korupsi, serta menanamkan pentingnya integritas, tanggung jawab, dan sikap jujur. Kehadiran media visual ini menjadi bentuk edukasi tidak langsung yang mampu menginspirasi dan memperkuat nilai-</p>
--	--	--	---

			nilai karakter pada siswa.
--	--	--	----------------------------

SURAT PERMOHONAN MENJADI INFORMAN

Kepada Yth. Bapak/ibu
Informan penelitian
Di Tempat

Dengan Hormat,

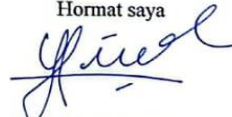
Sehubungan dengan penelitian yang akan saya lakukan dengan judul "Implementasi Pendidikan Antikorupsi Dalam Pembelajaran PPKn Di SMK PGRI 2 Cimahi" maka peneliti bermaksud mengumpulkan data melalui wawancara dan observasi.

Peneliti mengharapkan ketersediaan dan kehadiran menjadi informan untuk membantu pelaksanaan penelitian. Informasi yang peneliti dapatkan semata-mata hanya untuk kepentingan penelitian dan akan dijaga kerahasiaannya

Atas perhatian dan ketersediaan para informan peneliti saya selaku peneliti mengucapkan terimakasih atas ketersediaan para informan

Bandung, 12 Juni 2025

Hormat saya



Yusril Putra Nugraha

Lampiran 6 Dokumentasi





**SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
(STKIP) PASUNDAN CIMAH**
STATUS: TERAKREDITASI B
SK No.1708/SK/BAN-PT/Ak-Ppj/PT/X/2022 (B)
Jalan Permana 32 B ☎ (022) 6628311 Cimahi 40512

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
(STKIP) PASUNDAN CIMAH
NOMOR : 34/PK/STKIP.PAS/KL/XI/2024**
Tentang

PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI

KETUA STKIP PASUNDAN CIMAH

- Menimbang** : 1. Bahwa skripsi adalah karya ilmiah resmi yang merupakan salah satu syarat akhir dalam penyelesaian program S1 Sarjana Pendidikan bagi Mahasiswa STKIP Pasundan Cimahi.
2. Bahwa mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan penulisan skripsi memerlukan Dosen pembimbing sesuai dengan kualifikasi yang telah ditentukan.
3. Bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pembuatan skripsi dipandang perlu adanya surat keputusan tentang pengangkatan dosen pembimbing.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Tinggi.
3. Program Studi PPKn dengan SK BAN-PT Nomor : 2311/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/TV/2021 tanggal 21 April 2021 tentang Akreditasi Program Studi di lingkungan STKIP Pasundan
4. Buku Pedoman Akademik STKIP Pasundan Cimahi.
- Memperhatikan** : 1. Hasil keputusan rapat DBS Jurusan/Program Studi tentang Penyusunan dan Pembimbingan Skripsi tanggal 25 Oktober 2024
2. Surat usulan dari pimpinan Jurusan/Program Studi tentang penentuan rencana judul dan penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi tanggal 7 November 2024
- Menetapkan** : 1. **MEMUTUSKAN**
Mangkat Dosen Pembimbing Skripsi, yakni:
Pembimbing I : **Dr. Neneng Tripuspita, S.H., M.Pd.**
Pembimbing II : **Dr. A. Poppy Belladonna, S.H., M.Pd.**
Untuk membimbing penulisan/penyelesaian skripsi mahasiswa di bawah ini:
Nama : **Yusril Putra Nugraha**
NPM : **21500035**
Program Studi : **Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)**
Judul Skripsi : **Peran Guru PPKn Dalam Menerapkan Pendidikan Anti Korupsi Kepada Peserta Didik Kelas VIII Di SMP PGRI Cibereum**
2. Kepada Dosen Pembimbing akan diberikan honorarium sesuai ketentuan yang berlaku di STKIP Pasundan Cimahi.
3. Surat Keputusan ini berlaku **1 (satu) tahun** sejak tanggal ditetapkan.
4. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cimahi
Tanggal : 7 November 2024

Ketua,



Prof. Dr. Dedi Supriadi, M.Pd., AIFO.
NIP. 196012251988031002

- Tembusan:
1. Yth. Wakil Ketua I, II, III
2. Yth. Ketua Program Studi PPKn
3. Yth. Dosen Pembimbing
4. Arsip

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Yusril Putra Nugraha, lahir di Bandung pada tanggal 8 Mei 2002. Penulis merupakan anak dari keluarga yang menjunjung tinggi nilai-nilai pendidikan dan religiusitas, serta menganut agama Islam. Saat ini, penulis berdomisili di Jl. Maleber Utara Gg. Tundung Sari RT 03 RW 03, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Riwayat pendidikan penulis dimulai dari SD Negeri Garuda-Dadali, kemudian melanjutkan ke SMP Negeri 41 Bandung, dan SMK Kimia Dharma Bhakti pada jenjang menengah kejuruan. Setelah menyelesaikan pendidikan menengah, penulis melanjutkan studi ke jenjang perguruan tinggi di Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Pasundan Cimahi, program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Selama menempuh pendidikan, penulis aktif mengikuti berbagai kegiatan organisasi dan ekstrakurikuler. Di jenjang SMP dan SMK, penulis pernah menjadi anggota Paskibra serta aktif dalam kepengurusan Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS), yang turut membentuk jiwa kepemimpinan, kedisiplinan, dan rasa tanggung jawab. Di lingkungan kampus, penulis juga aktif mengikuti berbagai organisasi kemahasiswaan, baik di dalam kampus maupun luar kampus, sebagai wujud partisipasi dalam pengembangan diri, kepedulian sosial, dan jaringan profesional. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan STKIP Pasundan Cimahi. Penulis berharap karya ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang pendidikan kewarganegaraan.